



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024-2026



**BAPELITBANGDA
KABUPATEN SUMBA TENGAH -
PUSAT RISET KEBIJAKAN PUBLIK
BRIN
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
KATA SAMBUTAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN LITERATUR	6
A. Tinjauan Teoritis.....	6
B. Tinjauan Yuridis.....	7
BAB III METODOLOGI KEGIATAN	10
A. Tahapan Kegiatan	10
B. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen	11
BAB IV GAMBARAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI KABUPATEN SUMBA TENGAH	14
A. Tema Pengentasan Kemiskinan	14
B. Tema Peningkatan Investasi	33
C. Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintah (Penurunan Stunting).....	41
D. Tema Pengendalian Inflasi.....	58
E. Tema Peningkatan Pemakaian Produk Dalam Negeri	65
BAB V AGENDA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN SUMBA TENGAH 2024-2026	70
A. Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026	70
B. Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026	71
BAB VI MANAJEMEN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK	80
A. Susunan Tim Reformasi Birokrasi Tematik	80
B. Tugas Tim Reformasi Birokrasi Tematik.....	81
C. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.....	82
BAB VII PENUTUP	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Reformasi Birokrasi Tematik.....	9
Tabel 2. Peserta FGD Penyusunan Roadmap RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah.....	11
Tabel 3. Form Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program Reformasi Birokrasi Tematik.....	12
Tabel 4. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2024.....	15
Tabel 5. Persentase Penduduk Kabupaten Sumba Tengah Berumur 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Ijazah yang dimiliki Tahun 2022	19
Tabel 6. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tema Pengentasan Kemiskinan	22
Tabel 7. Deskripsi Rencana Program RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	27
Tabel 8. Target Peningkatan Investasi di Kabupaten Sumba Tengah.....	33
Tabel 9. Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota	34
Tabel 10. Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota.....	34
Tabel 11. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Tema Peningkatan Investasi.....	38
Tabel 12. Jumlah dan Persentase Balita Stunting Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota	42
Tabel 13. Perbandingan Data Prevalensi Stunting Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 dari Berbagai Sumber Data	44
Tabel 14. Hasil Evaluasi SPBE Provinsi NTT Tahun 2023 Berdasarkan Kabupaten/Kota	45
Tabel 15. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)	49
Tabel 16. Deskripsi Rencana Program RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah (Penurunan Stunting).....	54
Tabel 17. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Tema Pengendalian Inflasi	61
Tabel 18. Target Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026	66
Tabel 19. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri	68

Tabel 20. Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026	70
--	----

Tabel 21. Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026	71
--	----

Tabel 22. Susunan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah.....	80
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prevalensi Stunting di Nusa Tenggara Tahun 2023	43
Gambar 2. Keterkaitan Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi di Tingkat Internal dengan Nasional	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tahapan Kegiatan Penyusunan Roadmap RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026	10
Grafik 2. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2024.....	14
Grafik 3. 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Provinsi NTT Tahun 2023	15
Grafik 4. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Prevalensi Stunting Nasional.....	41
Grafik 5. Tingkat Inflasi Provinsi NTT, September 2023- September 2024	59

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah selesainya kegiatan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Sumba Tengah dengan Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dari hasil kegiatan kerjasama ini sudah dihasilkan roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah untuk Tahun 2024-2026.

Reformasi Birokrasi Tematik mulai diperkenalkan sejak lahirnya Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB yang selama ini sudah berjalan. Dalam pelaksanaan RB tematik ini ditetapkan beberapa isu prioritas nasional yang diangkat menjadi tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Dari hasil penyusunan roadmap RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah ini, kami menyadari bahwa masih banyak permasalahan mendasar yang perlu kami benahi dalam rangka untuk mencapai target pembangunan terkait 5 tema yang terdapat dalam RB Tematik. Mulai dari masih lemahnya koordinasi dan belum terbangunnya kolaborasi antar OPD, data yang belum sinkron, rendahnya kualitas SDM, dll. Dengan tersusunnya roadmap ini maka kami berharap semua permasalahan tadi pelan-pelan bisa kami atasi dengan baik.

Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada tim Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN yang sudah membantu kami menyusun roadmap RB Tematik ini. Selain itu kami juga mengucapkan terimakasih pada semua perwakilan OPD yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang sudah kami selenggarakan dalam rangka penyusunan Roadmap ini. Semoga Roadmap ini bisa menuntun kita ke arah pelaksanaan RB yang lebih baik.

Waibakul, Desember 2024

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sumba Tengah

Melkianus Umbu Ngailu, SP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026. Laporan ini disusun sebagai hasil kegiatan kerjasama dengan Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah.

Penyusunan Roadmap RB Tematik merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Untuk mendapatkan gambaran kondisi sebenarnya dan target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Sumba Tengah terkait dengan tema-tema RB Tematik, kami bersama Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama-sama dengan perwakilan dari OPD terkait.

Dari hasil FGD dan studi literatur yang kami lakukan, kami menemukan bahwa masih banyak sekali permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah baik terkait kemiskinan, investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, produk dalam negeri (PDN) dan inflasi. Beberapa permasalahan utama adalah belum terbangunnya pola koordinasi dan kolaborasi yang baik antar OPD di Kabupaten Sumba Tengah, masih belum optimalnya sinkronisasi data antar OPD yang terlibat di tema yang sama, masih lemahnya pengawasan pelaksanaan berbagai program yang dilakukan pemerintah, dll. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kami telah menyampaikan roadmap RB Tematik yang bisa ditindaklanjuti hingga tahun 2026 mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah yang telah mempercayakan kegiatan penyusunan Roadmap RB Tematik ini kepada kami. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para perwakilan OPD di Kabupaten Sumba Tengah yang telah bersedia hadir, berpartisipasi aktif dan bekerjasama dalam kegiatan diskusi yang sudah kita lakukan terkait dengan 5 tema RB Tematik.

Kami sampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam laporan kegiatan ini, masukan dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan untuk evaluasi dan perbaikan ke depan bagi tim penulis. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan pemerintahan Daerah kabupaten Sumba tengah untuk mendorong pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Desember 2024

Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik, BRIN

Yanuar Farida Wismayanti Ph.D

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja pemerintah masih rendah apabila dihubungkan antara input anggaran dengan output dan hasil organisasi. Eko Prasajo menulis pada Jakarta Post bahwa pada survei tahun 2012 yang dilakukan oleh The Political Economic Risk and Consultancy (PERC), Indonesia memperoleh skor sangat buruk yaitu 8,37 dari nilai terburuk 10 (Prasajo, 2015). Kemudian pemerintah melakukan perbaikan dalam berbagai sektor melalui reformasi birokrasi (Kemenpan, 2024) seperti tata kelola, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022;) untuk Government Effectiveness naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality; peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024).

Setelah dilakukan perbaikan kinerja melalui reformasi birokrasi, pemerintah masih menemukan permasalahan. Salah satu kendala adalah Reformasi Birokrasi (RB) belum dipandang sebagai *value* yang penting untuk dilakukan secara penuh (Sekreatariat Kabinet, 2022), sehingga dalam pelaksanaannya dianggap sebagai pekerjaan rutin tahunan menjelang penilaian indeks reformasi birokrasi. Tidak jarang unit kerja instansi pemerintah disibukkan mempersiapkan dokumen yang bersifat administratif (*administrative document-oriented*) dan kehilangan esensi utama reformasi birokrasi.

Walaupun masih menemukan tantangan dari sisi internal, Reformasi Birokrasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani. Wakil Presiden menyatakan bahwa RB bukanlah sebuah rutinitas, apalagi beban (Sekreatariat Kabinet, 2022). Dalam Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 secara jelas juga menyebutkan arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Jadi reformasi birokrasi hadir bukan untuk dirinya sendiri.

Oleh karena itu, RB sudah seharusnya tidak berakhir hanya sebagai dokumen yang sulit diimplementasikan, namun harus dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah, serta dapat diukur dan dirasakan manfaatnya. Saran para expert terkait pelaksanaan RB di Indonesia harus memungkinkan diimplementasikan serta sejalan antara visi dan strategi (Turner et al., 2022a). Dalam hal ini, Presiden dan Wakil Presiden menetapkan arah birokrasi, kemudian Kementerian PAN dan RB membuat kebijakan dan panduan pelaksanaan RB, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan arahan sesuai panduan dan standar yang telah ditetapkan tanpa melupakan konteks instansinya.

Di tataran implementasi, Kementerian PANRB merupakan *leading sector* pelaksanaan RB. Namun demikian, Kementerian PAN dan RB bukan satu-satunya aktor dalam implementasi RB di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Masing-masing Kementerian/ Lembaga juga melakukan RB. Bahkan dalam satu instansi, pelaksanaan RB tidak hanya menjadi tanggung jawab di satu struktur atau jabatan tertentu tetapi harus didukung oleh struktur lainnya. Begitu pula pada tingkat pemerintah daerah, *leading sector* pelaksanaan RB ada di bagian organisasi sekretariat daerah. Namun perlu didukung oleh perangkat daerah lainnya untuk mensukseskan RB dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Saat ini, RB ada yang general dan tematik. RB general bertujuan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sehingga dapat menyelesaikan masalah birokrasi di hulu (Kemenpan, 2023). RB tematik dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional sehingga dapat menyelesaikan masalah hilir (Kemenpan, 2023). Terdapat empat tema yang menjadi prioritas dalam RB tematik yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Tema penurunan prioritas aktual presiden terdiri atas dua, yaitu pengendalian inflasi dan penggunaan produk dalam negeri.

Pada tema pertama, pengentasan kemiskinan, RB diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan program pemerintah (Nalien & Ilham, 2019). Instansi pemerintah tentu perlu mempersiapkan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi, menyusun standar dan proses pengajuan bantuan yang mudah dilakukan, pelatihan keterampilan bagi para aparatur, dan program-program pemberdayaan ekonomi menjadi lebih cepat dan efisien menjadi poin penting dalam implementasi RB tematik pengentasan kemiskinan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administrasi bagi masyarakat miskin, tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Secara keseluruhan, dengan reformasi birokrasi yang berhasil dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan (Maya Puspitasari & Santoso, 2023).

Pada tema kedua, RB juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan daya tarik investasi dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan serta administrasi. Dengan merampingkan prosedur dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, reformasi ini mempermudah investor untuk memasuki pasar dan menjalankan usaha (Luca, 2016). Proses yang lebih transparan dan efisien mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang sering menjadi penghalang bagi investor potensial. Dengan lingkungan investasi yang lebih ramah dan terprediksi, negara dapat menarik lebih banyak investasi domestik dan asing yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fokus RB tematik digitalisasi administrasi pemerintahan adalah pembangunan birokrasi digital dengan fokus pada perbaikan digitalisasi struktur, *culture*, maupun kompetensi. Pelaksanaan tema ini tentu sangat kontekstual mengingat infrastruktur dan kompetensi untuk mendukung digitalisasi di masing-masing instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah sangat variatif

(Damar, 2024). Sehingga roadmap yang disusun sangat penting untuk memperhatikan kondisi instansi pemerintah. Pada RB tematik saat ini, digitalisasi administrasi pemerintahan dikhususkan pada pada isu stunting. Integrasi data, sistem yang kokoh tentu diperlukan untuk dapat mendukung penurunan stunting (Nathalie et al., 2023).

Pada tema yang keempat bagian pertama, RB dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui implementasi kebijakan yang lebih mendukung industri lokal. Dengan memperbaiki sistem administrasi dan mengurangi hambatan administratif, pemerintah didorong agar lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pengadaan yang mengutamakan produk-produk domestik (Sacks et al., 2014). Proses pengadaan pemerintah memastikan bahwa produk-produk lokal mudah untuk masuk dalam tender pemerintah, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk bersaing dengan produk impor. Sehingga pasar domestik dapat lebih terbuka untuk produk-produk dalam negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan dan daya saing produk lokal (Dawar & Frost, 1999).

Tema keempat yang berikutnya adalah pengendalian inflasi. Tata kelola pemerintahan yang lemah dapat mengakibatkan inflasi (Haider & Ghani, 2011). Pengelolaan yang lebih baik terhadap distribusi barang kebutuhan pokok serta pengurangan praktik monopoli dan kartel dapat membantu menurunkan tekanan inflasi. Selain itu, reformasi birokrasi yang disertai dengan peningkatan dalam pengumpulan data dan analisis ekonomi yang lebih akurat. data yang akurat dan lengkap dapat membantu proses pengambilan kebijakan yang tepat, termasuk kebijakan untuk penurunan angka inflasi (Furth, 2017).

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan RB di Indonesia, baik RB general maupun tematik tentu membutuhkan dukungan dari seluruh instansi pemerintah. Secara khusus dari pemerintah daerah yang berinteraksi dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. RB harus ditempatkan sebagai nilai yang tertanam di seluruh aparatur pemerintah kemudian diejawantahkan dalam ranah praksis pemerintahan.

Hasil evaluasi RB tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Kementerian PANRB bahwa terdapat 382 dari 624 instansi pemerintah berpredikat minimal baik (Kemenpan, 2024). Artinya masih ada 242 instansi pemerintah yang masih berpredikat di bawah baik. Salah satunya adalah Kabupaten Sumba Tengah. Pada tahun 2022 Sumba Tengah masuk dalam kategori C dengan nilai 40. Artinya RB hanya dilakukan secara formal di tingkat instansi dan sebagian kecil di unit kerja.

Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu Kabupaten muda yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Sumba Barat. Kabupaten Sumba Tengah menjadi daerah otonom baru (DOB) tahun 2007 melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain usia yang relatif muda dibandingkan kabupaten/ kota lain, Kabupaten Sumba Tengah juga masih masuk dalam daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Kriteria yang termasuk dalam daerah tertinggal adalah perekonomian Masyarakat yang masih rendah, sumber daya manusia masih rendah, sarana dan prasarana yang masih belum memadai, kemampuan keuangan daerah rendah, dan aksesibilitas yang terbatas. Kondisi ini menjadi faktor pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

masih belum terlalu fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menanggung beban kerja yang sangat variatif sehingga OPD tidak bisa fokus untuk pelaksanaan reformasi birokrasi. Contohnya adalah Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan; Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permasalahan lainnya adalah, Bagian Organisasi menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumba Tengah. Sementara OPD lainnya belum memberikan dukungan yang maksimal untuk pelaksanaan RB.

Semakin dewasanya usia pemerintah daerah dan semakin tingginya tuntutan Masyarakat pada birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tentu perlu membenahi proses reformasi birokrasi. Meningkatkan kualitas pelaksanaan RB tentu membutuhkan perencanaan yang baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumba Tengah, dokumen road map RB Sumba Tengah tidak boleh berdiri sendiri tetapi perlu menyelaraskan antara Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumba Tengah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa RB tidak bisa hanya menjadi beban aparatur dan satu unit kerja saja. Perlu adanya kolaborasi dan integrasi antar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan RB di Sumba Tengah perlu disusun roadmap RB sebagai panduan bagi seluruh perangkat daerah untuk terlibat dalam pelaksanaan RB dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Pertanyaan Penelitian

Dilatarbelakangi kondisi pelaksanaan RB di Kabupaten Sumba Tengah yang masih belum maksimal sehingga berbagai tujuan RB yang telah ditetapkan masih sulit untuk dicapai. Namun di sisi lain, masyarakat menuntut manfaat pembangunan yang nyata dirasakan. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan RB secara maksimal baik di tataran perencanaan maupun implementasi. Oleh karena itu, perlu dikaji terlebih dahulu kondisi eksisting secara detail pelaksanaan RB secara khusus RB tematik di Kabupaten Sumba Tengah termasuk faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan RB tematik di Kabupaten Sumba Tengah. Berangkat dari kondisi eksisting kemudian perlu dirumuskan roadmap yang efektif untuk pelaksanaan RB tematik sesuai konteks Sumba Tengah.

1. Bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang eksisting di Kabupaten Sumba Tengah?
2. Apa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di Kabupaten Sumba Tengah?
3. Bagaimana roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Kabupaten Sumba Tengah yang kontekstual dan efektif untuk mencapai tujuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang eksisting di Kabupaten Sumba Tengah.

2. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di Kabupaten Sumba Tengah.
3. Untuk menganalisis dan menyusun roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Kabupaten Sumba Tengah yang kontekstual dan efektif untuk mencapai tujuan.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

A. Tinjauan Teoritis

Studi reformasi birokrasi memiliki konteks yang cukup luas. Beragam sudut pandang mengkaji reformasi birokrasi dari beberapa aspek yang berbeda. Misalnya (Turner, 2013) yang berpendapat bahwa reformasi birokrasi merupakan perubahan yang signifikan untuk organisasi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian (Wihantoro et al., 2015) menyebutkan bahwa reformasi birokrasi terkait dengan efisiensi organisasi, perubahan budaya administrasi serta kulturnya. Keduanya menekankan bahwa reformasi birokrasi diharapkan akan terjadi efisiensi dalam organisasi.

Pakar lain ada juga yang melihat reformasi birokrasi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Reformasi birokrasi erat kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi pemerintah untuk lebih responsive untuk memahami kebutuhan masyarakat serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah (Briliantes et al., 2018); (Briliantes, 2018). Senada dengan itu, (Bolkvadze, 2017) dan (Ali, 2020) menyatakan reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi misalnya mendekatkan Masyarakat dengan politik. Reformasi birokrasi juga diartikan sebagai sebuah upaya pemerintah yang memberikan dampak positif bagi masyarakat (Petridou & Sparf, 2017). Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya berdampak dari pemerintah untuk senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sudut pandang berikutnya melihat reformasi birokrasi dari sisi SDM. (Ali, 2020) menyampaikan bahwa reformasi birokrasi menyentuh aspek SDM mulai dari proses rekrutmen, penempatan sampai Keputusan pemindahan kewenangan pengambilan keputusan. Begitu juga (Bolkvadze, 2017) yang menyatakan bahwa ruang lingkup reformasi birokrasi berada pada pilihan untuk penyederhanaan birokrasi dengan memangkas struktur dan mengurangi pegawai. Hal ini dilakukan agar harapannya birokrasi dapat lebih perform.

Selanjutnya ada studi dari (Nishihara et al., 2018) yang mengkaji reformasi birokrasi di negara-negara Asia Tenggara. Menurut negara-negara di Asia Tenggara seringkali menggunakan inisiatif reformasi birokrasi dengan melihat pada aspek outcome. Namun pada implementasinya masih terdapat kendala seperti konsep umum manajerial yang diaplikasikan sama di seluruh organisasi, padahal terdapat perbedaan system social, kultur, nilai, kebijakan, system insentif, dll. Lalu yang kedua ada asumsi umum bahwa outcome dari sebuah aktivitas organisasi dapat diukur secara objektif dan dapat dijadikan tolak ukur yang valid untuk menentukan sistem insentif dalam sebuah organisasi. Padahal dalam organisasi sektor public, tidak semua ukuran kinerja outcome dapat diukur secara umum. Ketiga, model tata kelola berbasis outcome dikembangkan di negara-negara barat yang

lebih fokus pada aspek efisiensi dan akuntabilitas, daripada aspek inovasi dan keleluasaan. Sedangkan, di negara-negara Asia Tenggara, pengembangan reformasi birokrasi lebih fokus pada inovasi organisasi dan kelincahan/keleluasaan organisasi (Nishihara et al., 2018).

Sedangkan dari hasil studi (Turner et al., 2022b) tentang reformasi di Indonesia, terdapat beberapa hal yang bisa dipelajari diantaranya: pertama, perubahan inkremental dapat dengan cepat dilakukan jika terdapat kemauan yang kuat baik dari sisi politis maupun birokrasi. Namun, jika dari sisi politik tidak memiliki keinginan yang kuat, maka perubahan akan berjalan lambat. Kedua, perbaikan atau perubahan tata Kelola SDM/MSDM menjadi kebutuhan. Ketiga, reformasi administrasi Negara harus dipahami sebagai proses jangka panjang. Problematika reformasi seringkali masih terbelenggu dengan paradigma administrasi negara lama dan budaya patronase. Keempat, yang paling penting ketika akan merumuskan visi dan strategi harus sejalan dan memiliki kemungkinan untuk dapat diimplementasikan. Dalam konteks Indonesia, target visi menjadi birokrasi kelas dunia belum sepenuhnya didukung dengan strategi untuk meraih visi tersebut. Terakhir, diperlukan sebuah reformasi yang didukung penuh oleh kekuatan politik dan berkelanjutan. Mereka perlu memastikan dan menjamin para pemimpin birokrasi untuk dapat mencapai visi tersebut serta memanfaatkan sumber daya yang selama ini kurang dimanfaatkan dalam reformasi yaitu masyarakat (Turner et al., 2022b).

Selain itu (Yayuk et al., 2017) menyimpulkan bahwa Reformasi Administrasi dapat berjalan baik, jika setidaknya memiliki beberapa kriteria yaitu adanya dukungan penuh dari pimpinan tertinggi, dapat mengidentifikasi secara jelas kebutuhan reformasi dan kebijakan yang dimandatkan, adanya konsolidasi yang kuat di internal serta komitmen dari seluruh stakeholder, membentuk tim lintas organisasi dan merumuskan sebuah strategi untuk mencapai tujuan, memperoleh dukungan yang kuat dari aktor eksternal, membuat reformasi menjadi sebuah proses yang dinamis serta menjaga momentum dan komitmen dari pemegang kekuasaan politik.

B. Tinjauan Yuridis

Pada tahun 2010 penyelenggara pemerintah makin menyadari bahwa masih banyak permasalahan mendasar yang ada dalam birokrasi Indonesia, mulai dari inefisiensi, perilaku koruptif, prosedur yang berbelit-belit, dsb. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip *clean government* dan *good governance* yang menitik beratkan pada pemberian pelayanan prima kepada Masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka disusunlah acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan dan monitoring hasilnya, maka Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dibagi ke dalam 3 fase pelaksanaan, sebagaimana tertuang dalam peraturan yang mengatur Roadmap Reformasi Birokrasi yang memiliki jangka waktu 5 tahunan. Pembagian ini didasarkan atas tahapan Pembangunan yang tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional. Grand Design reformasi birokrasi juga mengikuti periodisasi yang disusun dalam RPJPN.

Setiap periode roadmap reformasi birokrasi memiliki sasaran-sasaran yang berbeda yaitu : sasaran 2010-2014 fokus pada penguatan birokrasi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi bersih , bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Sasaran 2015-2019 dilakukan untuk akselerasi implementasi komponen strategis yang belum tercapai dalam kurun waktu lima tahun pertama. Sasaran 2020-2024 dilakukan peningkatan kapasitas birokrasi sebagai lanjutan dari sasaran lima tahunan kedua.

Saat ini kita sudah memasuki fase ketiga yang merupakan fase terakhir sebagaimana yang sudah direncanakan sejak lahirnya Grand Design Reformasi Birokrasi. Sebagai acuan pada fase ketiga ini sudah lahir Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Namun karena hasil evaluasi pelaksanaan RB dalam 2 fase sebelumnya belum menunjukkan dampak yang optimal, maka dirasa perlu untuk menajamkan beberapa ketentuan sehingga lahirlah Permen PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Penajaman roadmap RB 2020-2024 dikarenakan terdapat beberapa hal seperti substansi tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB nasional belum mampu menjawab isu strategis nasional dan instansional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintah, pemberantasan korupsi, sasaran program pembangunan yang bersifat lintas sektor dan lintas instansi pemerintah dan isu strategis lainnya. Oleh karena itu diperlukan strategi RB untuk orkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi, pengelolaan RB yang berfokus pada percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal dan isu prioritas lain seperti kemiskinan dan investasi, kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo khususnya diantara oemangku indeks sehingga pengukuran RB belum efektif.

Permen PANRB No.3 Tahun 2023 ini juga memperkenalkan perspektif baru dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Jika selama ini RB hanya menysar penyelesaian masalah di tingkat hulu, maka dalam penajaman roadmap RB yang terakhir ini juga dilihat dampak dari pelaksanaan RB di tingkat hilir. Sehingga dalam aturan ini dikenal istilah adanya *double track* pelaksanaan RB yaitu RB General yang menysar tingkat hulu dan RB Tematik yang menysar tingkat hilir.

RB tematik digunakan untuk mempercepat tuntutan dampak konkret dari implementasi reformasi birokrasi khususnya yang ada di level hilir yaitu pencapaian tujuan pembangunan nasional. RB tematik merupakan upaya untuk mengurai dan mengatasi permasalahan akar masalah tata kelola pemerintahan yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Terdapat 4 tema besar dalam pelaksanaan RB tematik diantaranya:

1. Pengentasan kemiskinan: dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan yang fokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Ruang lingkup

yang dilakukan diantaranya perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi dan reformulasi program atau kegiatan.

2. Peningkatan investasi: dilakukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meingkatkan indeks daya saing.
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan: dilakukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital.
4. Percepatan prioritas aktual presiden: merespon dan mengawal hal mendesak sesuai arahan presiden. Adapun prioritas aktual Presiden yang perlu direspon saat ini adalah peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Adapun indikator yang diukur dalam evaluasi RB tematik ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Reformasi Birokrasi Tematik

No	Tema	Indikator
1	Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan
2	Peningkatan Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi
3	Digitalisasi Pemerintahan	Menyesuaikan dengan fokus setiap tahunnya (Tahun 2024 fokus ke penurunan prevalensi stunting)
4	Prioritas Aktual Presiden	
	a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat penggunaan Produk Dalam Negeri
	b. Pengendalian Inflasi	Tingkat inflasi

BAB III

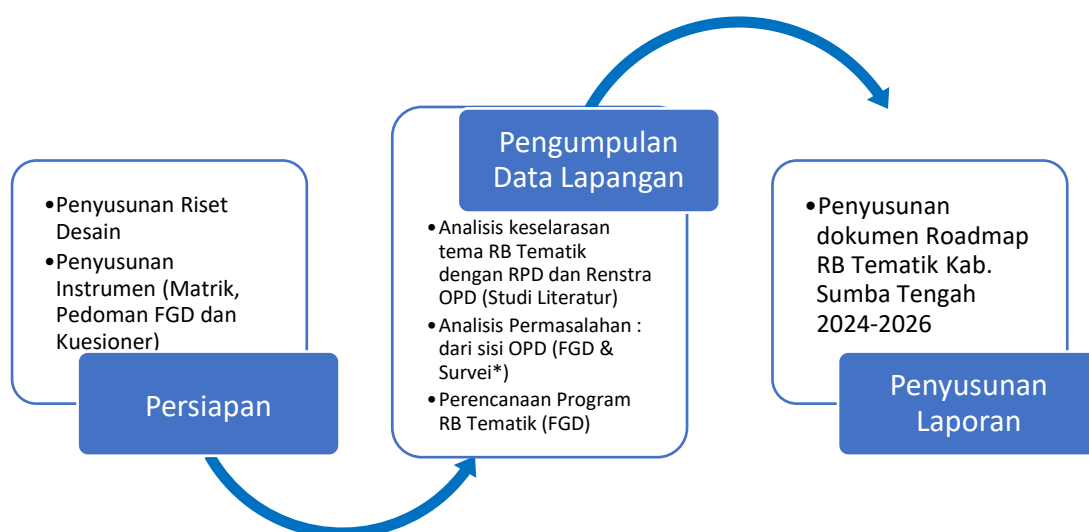
METODOLOGI KEGIATAN

A. Tahapan Kegiatan

Secara umum tahapan kegiatan penyusunan Roadmap RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026 dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data dan penyusunan laporan. Dalam tahap persiapan, tim menyusun riset desain dan menyusun beberapa instrument yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan data lapangan yaitu berupa matrik yang perlu diisi oleh OPD, pedoman FGD dan kuesioner survei.

Selanjutnya dalam tahap kedua, tim melakukan pengumpulan data lapangan. Metode pengumpulan data lapangan yang digunakan berupa studi literatur, FGD dan survei. Tahapan ini dimulai dengan pengumpulan dokumen dan analisis keselarasan antara tema RB Tematik yang sudah ditetapkan secara nasional dengan dokumen RPD dan Renstra OPD Kabupaten Sumba Tengah. Hasil dari analisis keselarasan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam tahap pengumpulan data berikutnya yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) dan Survei. Di dalam FGD digali berbagai permasalahan yang dihadapi OPD dalam program-program yang terkait dengan tema-tema RB tematik. Selain itu tim juga menyebarkan survei untuk memperkuat hasil FGD tersebut. Setelah penggalian masalah, selanjutnya masing-masing OPD terkait akan diminta untuk bisa merumuskan berbagai program RB yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi sebelumnya.

Pada tahap terakhir, semua hasil yang diperoleh dari tahap 1 dan tahap 2 akan disusun ke dalam laporan yang sistematis dan menjadi dokumen Roadmap RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026. Secara ringkas, berikut tahapan kegiatan penyusunan Roadmap RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026 :



Grafik 1. Tahapan Kegiatan Penyusunan Roadmap RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026

(Ket : *survey hanya untuk tema pengentasan kemiskinan)

B. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen

1. Studi literatur

Dalam tahapan ini tim melakukan pengumpulan dan analisis keselarasan dokumen perencanaan. Analisis awal ini dilakukan untuk memastikan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dan juga program/kegiatan di Renstra OPD sudah selaras dengan tema RB Tematik yang sudah ditetapkan oleh KemenPANRB.

Selain itu tim juga mempelajari berbagai kebijakan dan data sekunder yang terkait dengan tema-tema RB Tematik misalnya kebijakan dan data-data kemiskinan, kondisi investasi, data stunting, penggunaan produk dalam negeri dan tingkat inflasi. Data-data ini berasal dari berbagai sumber misalnya BPS, Kementerian Investasi/BKPM, Kemenko PMK, Provinsi NTT, Kabupaten Sumba Tengah, dll.

2. Focus Group Discussion (FGD)

Dalam tahapan FGD ini, tim menggali lebih dalam mengenai berbagai program yang telah dilakukan serta permasalahan yang dihadapi oleh OPD terkait penyelenggaraan program untuk mendukung pelaksanaan tema-tema RB Tematik, dan mengeksplorasi berbagai usulan program RB tematik. FGD dilakukan sebanyak 6 kali yang terdiri dari FGD pertama dengan tema RB secara umum dan FGD selanjutnya mengusung tema sesuai dengan tema RB Tematik. Dalam setiap FGD akan diundang para peserta dari berbagai OPD yang terkait dengan tema tersebut. Berdasarkan hasil analisis RPD dan diskusi dengan Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah, berikut daftar OPD yang diundang dalam setiap FGD :

Tabel 2. Peserta FGD Penyusunan Roadmap RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah

FGD	Tema	Peserta FGD
FGD I	Pengentasan Kemiskinan	1. Bapelitbangda 2. Dinas Sosial dan PPA 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Perikanan 6. Dinas Peternakan 7. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 8. Dinas Koperasi, UMKM, Perindag 9. Dinas PUPR 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja PM dan PTSP 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15. Bagian Kesra 16. Bagian perekonomian dan SDA
FGD II	Peningkatan Investasi	1. Diskop UMKM perindag, 2. Dinas PUPR, 3. Bapelitbangda 4. Dinas transmigrasi, tenaga kerja PM dan PTSP

FGD	Tema	Peserta FGD
		5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6. Bagian perekonomian dan SDA 7. Bagian pembangunan 8. Badan Keuangan Daerah
FGD III	Pengendalian Inflasi	1. Dinas Koperasi UMKM, Perindag, 2. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, 3. Dinas Peternakan, 4. Dinas Perikanan, 5. Bagian perekonomian dan SDA 6. Bagian Pembangunan 7. Bapelitbangda 8. Badan Keuangan Daerah
FGD IV	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)	1. Dinas Kesehatan, 2. Dinas Sosial dan PPA, 3. Dinas Perikanan, 4. Dinas PUPR, 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 6. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, 7. Dinas Kominfo, 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 9. Dinas DUKCAPIL 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Bapelitbangda 12. Badan Keuangan Daerah
FGD V	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Dinas Koperasi UMKM Perindag 2. Bagian pengadaan barang dan jasa 3. Dinas transmigrasi, tenaga kerja PM dan PTSP 4. Badan Keuangan Daerah

Untuk mempermudah penggalan data dalam FGD, maka sebelum FGD dilaksanakan, para peserta diminta untuk mengisi matrik analisis permasalahan dan eksplorasi usulan program RB Tematik. Berikut matriknya :

Tabel 3. Form Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program Reformasi Birokrasi Tematik

Tema :				
OPD :				
No	Program (dari dokumen RPD)	Program/Kegiatan (dari Renstra OPD)	Masalah	Rencana Program RB Tematik
1			•	•
			•	•
			•	•
2			•	•
			•	•
3			•	•
			•	•

Setelah matrik tersebut diisi, maka dalam FGD para peserta dari masing-masing OPD diminta untuk bisa menjelaskan secara lebih detail mengenai berbagai permasalahan serta berbagai rencana dan usulan program RB Tematik yang akan dimasukkan ke dalam roadmap RB Tematik.

Untuk memandu jalannya FGD, berikut beberapa poin pembahasan utama dalam FGD :

- a. Bagaimana capaian target indikator RB Tematik tahun 2023 dan 2024 (terkait tema terkait) ?
- b. Apa program/kegiatan OPD yang dilakukan untuk mendukung tema RB terkait ?
- c. Apa permasalahan/tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan?
- d. Apa program/kegiatan RB yang bisa dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut?
- e. Bagaimana tingkat kesiapan implementasi program/kegiatan tersebut (dari sisi SDM, ketersediaan anggaran, dukungan stakeholder)?
- f. Bagaimana rencana manajemen/pengelolaan RB tematik?
- g. Rumuskan target capaian indikator RB Tematik 2025-2026!

3. Survei

Tahapan berikutnya yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data lapangan adalah survei. Survei dilakukan untuk memperkuat hasil FGD yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena berbagai keterbatasan seperti waktu dan sumber daya, maka survey tidak dilakukan untuk semua tema RB Tematik. Tema RB tematik yang akan disurvei dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat urgensitasnya. Untuk itu, tim memilih untuk melakukan survey hanya pada tema Pengentasan Kemiskinan.

Survei dilakukan untuk melihat persepsi para pemangku kepentingan tentang penyebab utama tingginya kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah serta persepsi terkait program pengentasan kemiskinan yang paling tepat untuk diterapkan di Kabupaten Sumba Tengah. Survei dilakukan terhadap beberapa Kepala OPD yang termasuk dalam OPD yang bertanggung jawab terhadap pengentasan kemiskinan, Camat dan Kepala Desa. Pemilihan responden dalam survei ini dilakukan secara *purposive* dimana ada pertimbangan tertentu yang mendasari pemilihannya. Pertimbangan pemilihan responden tersebut adalah karena mereka adalah pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan dan tugas sehari-hari mereka banyak berhubungan dengan masyarakat miskin sehingga mereka dianggap sebagai pihak yang paling mengerti kondisi kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah. Kuesioner survei disampaikan di lampiran.

BAB IV

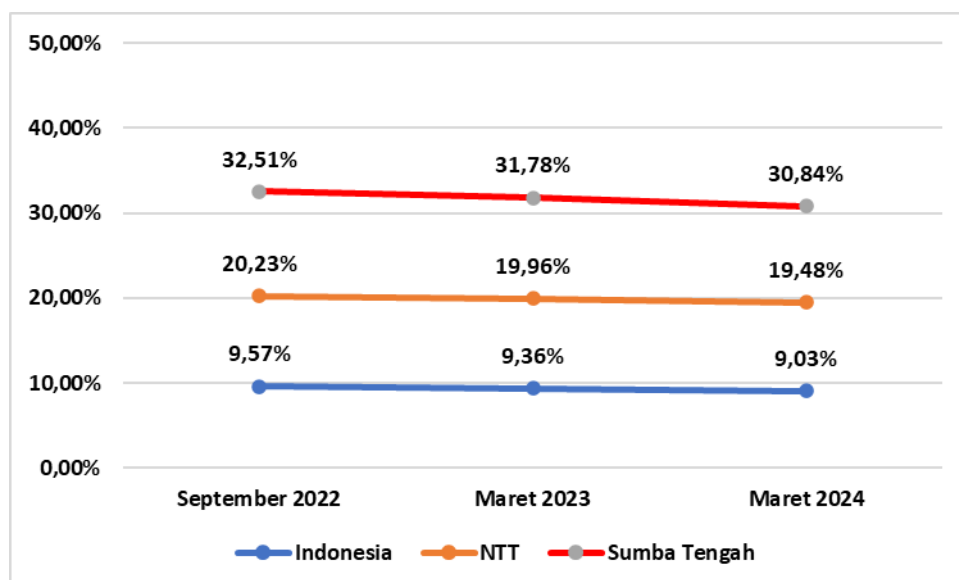
GAMBARAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

A. Tema Pengentasan Kemiskinan

Dalam Perpres 105 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 Kabupaten Sumba Tengah masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal bersama 12 Kabupaten lainnya di NTT. Salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam program percepatan pembangunan daerah tertinggal ini adalah persentase penduduk miskin (PPM).

Saat ini Kabupaten Sumba Tengah merupakan Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data BPS Bulan Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Tengah adalah 30,84%. Angka ini berada jauh diatas persentase penduduk miskin di Provinsi NTT yaitu 19,48%, padahal Provinsi NTT sendiri menduduki peringkat ketiga dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat (bps.go.id, 2023). Begitu juga di tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah selalu berada jauh diatas rata-rata persentase provinsi NTT dan Indonesia. Berikut perbandingannya :

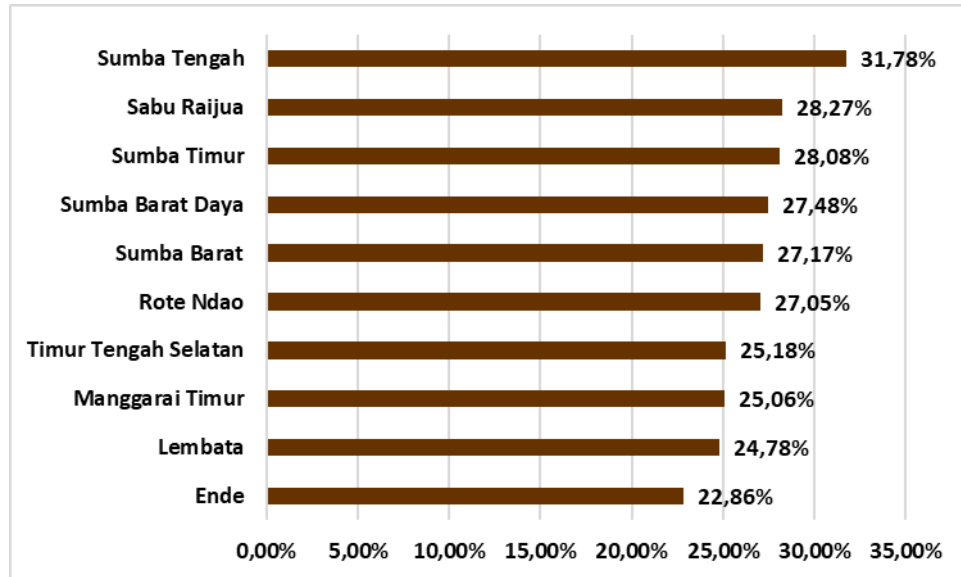
Grafik 2. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2024



Sumber : data diolah dari BPS, 2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi NTT, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Tengah juga memiliki selisih yang cukup besar. Berikut data 10 Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi NTT Tahun 2023:

Grafik 3. 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Provinsi NTT Tahun 2023



Sumber : data diolah dari BPS, 2024

Selain tertinggi dalam hal persentase penduduk miskin, ternyata dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, Sumba Tengah juga menduduki posisi tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi NTT. Menurut BPS, Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut gambaran beberapa indikator kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2024 :

Tabel 4. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	25,37	25,48	24,29	24,24	23,81
Persentase Penduduk Miskin (%)	34,49	34,27	32,51	31,78	30,84
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	307.853,00	311.199,00	341.513,00	362.089,00	381.760,00
Indeks Kedalaman Kemiskinan	6,57	8,65	8,08	8,16	7,59
Indeks Keparahan Kemiskinan	1,57	2,71	2,62	3,03	2,36

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Tengah, 2024

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah telah menyusun berbagai strategi kebijakan. Salah satunya menurut Inpres No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, strategi kebijakan untuk mempercepat penghapusan

kemiskinan ekstrem meliputi pengurangan beban pengeluaran Masyarakat, peningkatan pendapatan Masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang telah mengeluarkan berbagai program/kegiatan untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayahnya. Berdasarkan hasil FGD dengan para perwakilan OPD-OPD di lingkungan Kabupaten Sumba Tengah, diketahui bahwa sudah banyak program yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, baik program yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sendiri. Berikut program/kegiatan yang telah dilaksanakan :

a. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini merupakan program dari Kementerian Sosial, namun dalam penyalurannya dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumba Tengah. Hingga FGD dilaksanakan, pemberian bansos PKH tahun 2024 sudah diberikan sebanyak 3 kali kepada para keluarga miskin di Kabupaten Sumba Tengah. Penerima bantuan ini merupakan orang-orang yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdapat dalam aplikasi SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) Next Generation yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

b. Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)

Program ini juga merupakan program pemerintah pusat yang menjamin pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Penerima manfaat JKN-KIS ini juga mengacu ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun jika ada masyarakat miskin yang belum tercover, maka akan diberikan Jamkesda. Karena program ini, maka pada tahun 2023, Kabupaten Sumba Tengah memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023. Penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Sumba Tengah telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95% peserta JKN dari seluruh jumlah penduduk.

c. Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program ini merupakan hasil dari Pokok Pikiran (pokir) DPRD Provinsi NTT. Di Kabupaten Sumba Tengah terdapat sekitar 23 KUBE yang mendapatkan bantuan, masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, masing-masing KUBE harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas koperasi, UMKM, Perindag.

d. Bantuan Beras untuk Kemiskinan Ekstrim

Program ini merupakan program dari Pemerintah Provinsi NTT. Masing-masing keluarga penerima manfaat diberikan beras masing-masing 20 kg dengan kualitas premium. Jumlah keluarga yang akan diberikan bantuan ini sebanyak 175 KK.

e. Bantuan Emergency untuk Korban Kebakaran

Bantuan yang bersifat insidental ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Selama ini bantuan diberikan dalam bentuk bahan pangan, peralatan sekolah, pakaian, dll. Dengan adanya bantuan ini diharapkan bisa menghibur dan menguatkan masyarakat yang menjadi korban bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

- f. Pengadaan Ayam Pedaging
Program ini diinisiasi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Tengah. Program ini difokuskan pada keluarga miskin dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengeluarannya.
- g. Pemberian benih ikan gratis
Program ini diberikan oleh Dinas Perikanan kepada beberapa kelompok budidaya yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah. Hingga waktu FGD dilaksanakan, sudah ada 7000 ekor benih ikan yang sudah diserahkan kepada masyarakat untuk tahun 2024 ini.
- h. Pembuatan kolam pekarangan
Program yang digawangi oleh Dinas Perikanan ini selain bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembiayaan program ini berasal dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) 2024.
- i. Program pembagian alat tangkap gillnet dan kapal
Program ini juga digawangi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Tengah. Pembagian alat tangkap gillnet dan kapal diberikan pada beberapa kelompok nelayan di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan.
- j. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Program pemberian BLT yang bersumber dari anggaran dana desa ini dilakukan dalam rangka menangani kemiskinan ekstrem. Program ini merupakan salah satu program prioritas yang disebutkan dalam Permendes No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. BLT Dana Desa biasanya diberikan untuk masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial PKH, kehilangan mata pencaharian, disabilitas, memiliki penyakit menahun serta rumah tangga dengan anggota keluarga tunggal lanjut usia. Besaran BLT yang diberikan adalah Rp.300.000 per bulan selama 12 bulan.
- k. Program pemberian bantuan hewan ternak
Selain dari Dinas Peternakan, ternyata Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Sumba Tengah juga melaksanakan program pemberian bantuan hewan ternak seperti bebek, ayam dan kambing. Program ini juga dibiayai dari dana desa masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
- l. Program Bantuan Dana Bergulir
Bantuan dana bergulir ini diberikan dalam rangka penguatan modal. Program ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2022. Program yang dikelola oleh Dinas koperasi, UMKM, Perindag ini dianggap sangat membantu karena bunga yang ditetapkan cukup kecil yaitu 2,4% per tahun dan waktu pengembaliannya adalah 1 tahun.
- m. Food Estate
Program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 ini merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Terdapat beberapa daerah yang ditetapkan sebagai kawasan food estate di Indonesia seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Sumba Tengah sendiri terdapat 10.000 hektare lahan yang ditetapkan sebagai kawasan food estate. Lahan tersebut terbagi menjadi kawasan persawahan (5.400 ha) dan lahan pertanian kering (4.600 ha). Program ini bertujuan

untuk mengembangkan sentra produksi pangan secara terpadu yang meliputi pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada kawasan pertanian. Dalam program ini diberikan bantuan kepada kelompok tani berupa sarana produksi seperti benih berlabel, pupuk, obat-obatan, dll. Beberapa kawasan food estate terdapat di wilayah Kecamatan Katikutana dan Kecamatan Katikutana Selatan.

n. Desa mandiri benih

Program ini merupakan program Kementerian Pertanian. Program ini memanfaatkan potensi lahan dan sumber air yang ada di setiap desa kemudian petani akan dibimbing untuk melakukan penangkaran benih lalu prosesnya dikawal mulai hulu sampai hilir, bagaimana budidayanya sampai ke pengawalan di laboratorium. Dari program ini diharapkan desa mampu menghasilkan benih yang mereka butuhkan secara mandiri.

o. Desa mandiri pangan

Program ini juga merupakan program kementerian pertanian yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan khususnya di pedesaan. Dalam program ini, keluarga miskin dan rawan pangan diberikan bantuan melalui pendekatan pemberdayaan. Setiap desa akan mendapatkan bantuan berupa pelatihan, penyediaan fasilitator dan penyediaan dana bergulir sebesar 100 juta per desa.

p. Budidaya tanaman hortikultura

Pengembangan kegiatan budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena kondisi iklim di Sumba Tengah yang didominasi kemarau panjang maka budidaya tanaman hortikultura diutamakan di lahan-lahan yang dekat dengan sungai atau sumber air.

q. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni

Program bantuan ini sudah berakhir di tahun 2023. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang masing-masing sebesar 65 juta. Pada tahun 2023 terdapat 262 unit rumah yang memperoleh bantuan ini dan tersebar di 65 desa yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Di Kabupaten Sumba Tengah program ini dikenal juga dengan Program Rumah Mandiri yang masuk ke dalam salah satu Program Strategis Bupati Sumba Tengah yaitu Paulus S.K.Limu dan Wakil Bupati Daniel Landa sejak tahun 2019. Selain itu, program pembangunan rumah layak huni juga ada yang dianggarkan dari dana APBDes dan CSR Bank NTT. Dari semua program pembangunan tersebut terdapat 4.072 unit rumah yang sudah dibantu.

r. Bantuan Pembangunan sarana Air bersih

Program pembangunan ini juga merupakan salah satu program strategis Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah sejak tahun 2019. Dari tahun 2019 hingga 2023 telah dibangun 6.254 unit saluran rumah (SR). Jumlah masyarakat yang terlayani dari pembangunan saluran tersebut adalah 60.611 jiwa.

s. Bantuan Pembangunan Sanitasi

Selain pembangunan rumah layak huni dan sarana air bersih, masyarakat juga butuh pembangunan sanitasi atau yang lebih dikenal dengan sarana MCK. Dengan adanya sarana MCK yang layak tentu diharapkan akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan keterangan Dinas PUPR, hingga saat ini capaian sanitasi yang layak di Kabupaten Sumba Tengah telah mencapai 62%.

t. Peningkatan sarana infrastruktur

Dalam rangka untuk mendukung akses dan membuka keterisolan maka dilakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah.

u. Program beasiswa abadi

Program beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa kurang mampu yang sudah berada di semester 3 dan memiliki IPK minimal 2,5. Program ini juga merupakan salah satu program unggulan Kepala Daerah Sumba Tengah sejak tahun 2019. Dengan adanya beasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas generasi muda Sumba Tengah agar dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain.

Pelaksanaan semua program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah tentu membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Menurut Bapelitbangda Kab. Sumba Tengah, untuk tahun 2023-2024 mereka sudah menyediakan anggaran sekitar 80 Milyar Rupiah untuk membiayai semua program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Namun jika dibandingkan dengan hasil capaiannya, penurunan angka kemiskinan di Kab Sumba Tengah masih belum terlalu menggembirakan.

Masih rendahnya capaiannya ini mungkin salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan berbagai program yang diberikan oleh pemerintah. Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi OPD sehingga implementasi program yang mereka rencanakan pun menjadi tidak optimal. Permasalahan pertama adalah rendahnya kualitas SDM. Berdasarkan data tahun 2020, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Sumba Tengah didominasi oleh orang-orang yang tidak punya ijazah dan tamatan SD. Berikut datanya :

Tabel 5. Persentase Penduduk Kabupaten Sumba Tengah Berumur 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Ijazah yang dimiliki Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan yang ditamatkan	Persentase
1	Tidak punya ijazah	31,44%
2	Tamat SD/MI	22,90%
3	Tamat SMP/MTs	19,43%
4	Tamat SMA/MA	16,24%
6	Tamat Diploma I dan II	0,10%
7	Tamat Akademi/Diploma III	1,46%
8	Tamat DIV/S1/S2/S3	8,44%

Sumber BPS Provinsi NTT, 2023

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini menyebabkan program pemerintah yang bersifat pemberdayaan menjadi sulit dilaksanakan. Misalnya saja beberapa program pelatihan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dll. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah tentu saja akan lebih sulit untuk dilatih dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, sehingga dibutuhkan upaya dan waktu yang lebih lama untuk melatih mereka.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentu juga mempengaruhi mindset dan karakteristik masyarakatnya. Pelaksanaan berbagai program pemerintah terkendala karena mayoritas masyarakat Kabupaten Sumba Tengah terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Banyak sekali bantuan yang sudah diberikan pemerintah seperti Bansos PKH, BLT, bantuan ternak, bantuan benih, dll. Namun pada kenyataannya bantuan ini tidak banyak merubah keadaan dan mereka tetap saja menyebut diri mereka miskin. Mindset atau mental miskin masyarakat ini yang menyebabkan mereka selalu ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Ketika kehidupan mereka menjadi lebih baik, mereka takut tidak diberikan bantuan lagi oleh pemerintah. Perilaku ketergantungan masyarakat ini juga membuat tidak adanya keberlanjutan program pemerintah. Misalnya terkait bantuan benih ikan. Ketika diberikan bantuan, Dinas perikanan berharap benih tersebut bisa berkembang biak dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun pada kenyataannya, ketika panen mereka tidak bisa melanjutkan program budidaya tersebut dan meminta benih baru. Begitu juga dengan bantuan ternak. Tidak jarang, bantuan ternak yang diberikan pemerintah malah dikonsumsi/digunakan untuk acara adat. Selain itu program bantuan dana bergulir dari Dinas koperasi, UMKM, Perindag juga terhenti karena faktor masyarakat. Rendahnya kesadaran dan komitmen masyarakat untuk membayar pinjaman menyebabkan tingginya kredit macet sehingga program tidak bisa dilanjutkan.

Selain bantuan secara penuh, pemerintah juga memberikan beberapa bantuan yang sifatnya stimulan yang mana masih membutuhkan keterlibatan/partisipasi masyarakat untuk menyuksekkannya. Contohnya bantuan pembangunan rumah layak huni dan pembangunan sanitasi. Pelaksanaan program ini banyak yang terlambat penyelesaiannya karena rendahnya partisipasi masyarakat. Mereka lebih banyak hanya menunggu peran aktif pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Permasalahan berikutnya adalah terkait data kemiskinan. Banyak sumber data kemiskinan yang saat ini digunakan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK, Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas, dll. Antara satu data dengan data lainnya seringkali ditemukan ketidaksinkronan, sehingga Bapelitbangda menyatakan ada kekacauan data kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah. Karena kekacauan ini, maka program yang dilaksanakan berpotensi jadi tidak tepat sasaran. Ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan OPD terhadap masyarakat yang menerima bantuan. Misalnya terkait bantuan sosial PKH, Dinas Sosial sulit untuk mengontrol bagaimana masyarakat membelanjakan uang bantuan yang telah diberikan. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga tidak bisa benar-benar mengontrol apakah penentuan masyarakat miskin yang ada di desa sudah tepat atau ada alasan lain dibaliknya.

Kolaborasi antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan juga belum terjalin secara optimal. Selama ini masing-masing OPD menjalankan programnya sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang intens dengan OPD lain yang mungkin saja terkait dengan program yang mereka jalankan. Buktinya hingga saat ini dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sumba Tengah belum selesai disusun hingga saat ini, sehingga belum ada acuan yang jelas untuk melakukan program penanggulangan kemiskinan yang sinergis antar OPD.

Permasalahan berikutnya adalah terbatasnya akses untuk memasarkan berbagai produk olahan yang telah dihasilkan oleh masyarakat. Dinas pertanian pernah melakukan bimtek pengolahan pangan lokal, begitu juga dengan dinas perikanan pernah melakukan pelatihan pengolahan ikan menjadi abon. Namun setelah diberikan pelatihan, tidak ada langkah konkrit yang bisa dilakukan masyarakat karena mereka terkendala tidak adanya akses untuk menjual produk tersebut.

Dari sisi faktor alam ternyata juga mempengaruhi keberhasilan program pemerintah. Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Sumba Tengah seringkali menjadi alasan gagalnya kegiatan budidaya berbagai tanaman yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian. Dan terakhir, keterbatasan anggaran juga banyak dikeluhkan oleh OPD sebagai masalah klasik yang menghambat keberhasilan program mereka.

Dari hasil diskusi dan survei yang dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat beberapa penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah diantaranya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, mindset/karakter masyarakat yang selalu bergantung pada bantuan pemerintah (mental miskin), kemarau panjang, serta faktor budaya yang seringkali membebani perekonomian masyarakat, dll.

Hasil identifikasi program eksisting dan analisis permasalahan dari masing-masing OPD diatas dirangkum dalam tabel 6 berikut. Kedua hal ini menjadi dasar dalam perumusan program-program yang akan dimasukkan ke dalam Program RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah. Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah sebaiknya diarahkan pada program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan dapat mendorong mereka untuk lebih mandiri. Sedangkan program-program semacam bantuan sosial seharusnya dijadikan sebagai jalan terakhir untuk membantu orang-orang yang benar-benar tidak bisa diberdayakan seperti lansia atau orang disabilitas yang sudah parah.

Tabel 6. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tema Pengentasan Kemiskinan

No	Organisasi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
1	Bapelitbangda	• Penyusunan logical framework kinerja penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada outcomes sesuai kondisi • Review/kajian terhadap desain program, kegiatan dan anggaran yang tepat • Sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara multilateral antara kementerian/lembaga/pemda/BUMN/ dan swasta • Melakukan kerjasama dalam monev kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	• Tidak sinkronnya data kemiskinan (DTKS, P3KE, dll)	• Sinkronisasi dan pembaruan data kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah • Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah • Kajian Evaluasi ketepatan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan • Kolaborasi pengentasan kemiskinan dengan stakeholder (swasta, BUMN, masyarakat)
2	Dinas Sosial dan PPA	• Fasilitasi Program Bantuan sosial PKH • Fasilitasi Program Bantuan KUBE dari DPRD Provinsi • Fasilitasi Program Bantuan Beras Kemiskinan Ekstrem • Program penanganan bencana (Bantuan emergency untuk korban kebakaran) • Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Inovatif (BUPI) untuk keluarga Miskin • Rekonsiliasi data penduduk miskin dan pemutakhiran data sasaran • Melakukan profiling penduduk miskin dengan memanfaatkan data dari K/L teknis • Melakukan verifikasi dan validasi terhadap sasaran	• Mental miskin • Sulitnya pengawasan penggunaan bantuan	• Sosialisasi budaya malu dianggap miskin (bersama tokoh agama/tokoh masyarakat) • Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin berdasarkan data DTKS

No	Organisasi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
3	Dinas Kesehatan	- JKN KIS - Jaminan Kesehatan Daerah	Keterbatasan anggaran	- Jaminan Kesehatan Daerah - Verifikasi dan validasi data Masyarakat miskin penerima bantuan JKN KIS/Jamkesda - Kajian/ Evaluasi implementasi JKN-KIS/Jamkesda untuk Masyarakat Miskin
4	Dinas Peternakan	- Bantuan Ayam Pedaging dan itik - Bantuan ternak Kambing, Babi, Sapi, Kerbau dan Kuda	- Keterbatasan anggaran - Ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah - Ternak dikonsumsi/ digunakan untuk upacara adat - Penyakit pada ternak (ASF pada babi dan Surra pada Kuda dan Kerbau)	- Bantuan ternak Kambing, Babi, Sapi, Kerbau dan Kuda pada kelompok peternak - Pelatihan pembuatan produk olahan hasil ternak - Bantuan penyediaan alat-alat pengolahan produk peternakan - Kerjasama pemasaran
5	Dinas Perikanan	- Pemberian benih ikan gratis - Pengadaan kolam pekarangan - Program pembagian alat tangkap gillnet dan kapal penangkapan ikan - Pelatihan pengolahan ikan menjadi abon	- Ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah - Ada penangkapan ikan liar di wilayah pantura - Tidak ada tempat pemasaran	- Program pengelolaan perikanan tangkap - Program pengelolaan perikanan budidaya - Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Fasilitasi food estate - Desa mandiri benih - Desa mandiri pangan - Kegiatan budidaya tanaman hortikultura - Pelatihan pengolahan pangan lokal	- Sulitnya petani mengakses permodalan - Rendahnya kualitas SDM Petani - Iklim : kemarau panjang - Perilaku petani : Juni-oktober tidak mau bertani karena sibuk acara adat - Tidak ada tempat pemasaran	- Penyuluhan terkait teknik-teknik pertanian di musim kemarau - Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal - bantuan penyediaan alat pengolahan pascapanen pada kelompok tani - Festival pangan lokal
7	Dinas Koperrasi, UMKM Perindag	- Program Bantuan Dana Bergulir - Fasilitasi Program Bantuan KUBE dari DPRD Provinsi - Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	- Rendahnya komitmen masyarakat untuk mengembalikan pinjaman (dipakai untuk keperluan lain) - Keterbatasan anggaran	- Pelatihan kewirausahaan, - Pelatihan pemasaran online/e-commerce - Pusat konsultasi dan pendampingan kewirausahaan,

No	Organisasi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
		• Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi • Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi • Program pendidikan dan latihan perkoperasian • Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi (bantuan modal usaha untuk koperasi) • Program pengembangan UMKM	• Kurangnya koordinasi antara DPRD Provinsi dengan Pemkab Sumba Tengah • Tidak ada tempat pemasaran	• Kompetisi Kewirausahaan • Penciptaan sentra pemasaran terpadu (misalnya : pusat oleh2 sumteng) • Bazaar UMKM • Penguatan dan pendirian Koperasi Unit Desa (KUD)
8	Dinas PUPR	• Pembangunan Rumah layak huni • Pembangunan Sanitasi • Pembangunan sarana air bersih • Peningkatan sarana infrastruktur	• Rendahnya partisipasi masyarakat • Kendala pembebasan lahan	• Pembangunan Rumah layak huni • Pembangunan Sanitasi • Pembangunan sarana air bersih • Peningkatan sarana infrastruktur ke lokasi objek wisata • Pembangunan embung dan penampungan air
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	• Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Program pemasaran pariwisata • Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dan produk yang mendapatkan perlindungan HAKI) • Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif • Program pengembangan kebudayaan (revitalisasi dan inventarisasi karya budaya) • Program pengembangan kesenian tradisional (festival seni dan budaya)	• Sulitnya akses ke objek wisata • Persentase pengembangan lokasi pariwisata masih rendah • Arus kunjungan wisatawan masih rendah • Jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif masih sedikit	• Pengembangan Produk dan Pertunjukan Budaya Unggulan khas Sumba Tengah • Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata • Festival Wisata Sumba Tengah • Beasiswa Bidang Pariwisata • Promosi Wisata Sumba Tengah • Revitalisasi Nilai Budaya/Adat

No	Organisasi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
10	Dinas PMD	• Program penataan desa (sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik) • Program peningkatan kerjasama desa (kerjasama desa dengan pihak ketiga) • Program administrasi pemerintahan desa (penetapan produk hukum desa) • Pemantauan program desa (termasuk program pengentasan kemiskinan seperti BLT, Bantuan hewan ternak, bantuan pembangunan rumah layak huni)	• Sulitnya pengawasan dalam penentuan masyarakat yang menjadi sasaran program	• 1 Desa 1 BUMDes • Penyelarasan program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten • Monitoring dan Evaluasi program pengentasan kemiskinan di desa
11	Dinas PPO	• Program pengelolaan pendidikan (pemenuhan SPM pendidikan dasar) • Program pengembangan kurikulum (pemenuhan kurikulum muatan lokal PAUD, PNF dan pendidikan dasar) • Program pendidik dan tenaga kependidikan (peningkatan kualifikasi pendidikan guru) • Program pengendalian perizinan pendidikan (pemberian izin PAUD, PNF dan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat) • Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri)	• Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat • Banyak siswa yang jarak tempat tinggalnya jauh dari sekolah	• Wajib belajar 12 Tahun • Sekolah gratis untuk SD dan SMP • Bantuan biaya pendukung pendidikan bagi siswa berprestasi (SD dan SMP) • Rehabilitasi sarana prasarana sekolah • Peningkatan kualitas guru • Sosialisasi Layanan pendidikan non formal (Paket A, Paket B, Paket C) • Pendampingan untuk mendapatkan akses beasiswa bagi siswa SMA/Mahasiswa • Bus sekolah/mobil jemputan
12	Dinas transmigrasi, tenaga kerja PM dan PTSP	• Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja (pelatihan berbasis kompetensi) • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program hubungan industrial	• Rendahnya investasi yang masuk • Terbatasnya lapangan kerja	• Pelatihan vokasi/keterampilan • Bursa Kerja • Promosi penanaman modal

No	Organisasi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
13	Dinas Dukcapil	Program pendaftaran penduduk	Data kemiskinan belum akurat (mungkin masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki dokumen kependudukan sehingga tidak terdata sebagai warga miskin)	Penerbitan/pembaruan KK, akte kelahiran dan KTP bagi warga miskin
14	Dinas Perhubungan	- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan : pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan, pemenuhan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan - Program pengelolaan pelayaran : Pelayanan pelabuhan feri		Penyelesaian pembangunan terminal
15	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Bantuan sosial beasiswa pendidikan (Program beasiswa abadi)		Bantuan sosial beasiswa pendidikan (Program beasiswa abadi)

Deskripsi Rencana Program RB Tematik Pengentasan Kemiskinan :

Tabel 7. Deskripsi Rencana Program RB Tematik Pengentasan Kemiskinan

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
1	Bapelitbangda	Sinkronisasi dan Pembaruan data kemiskinan Kab. Sumbeng	• Forum koordinasi untuk mengintegrasikan data kemiskinan antara Bapelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Kecamatan, Pemerintah Desa, BPS, BPJS, dll. • Membuat portal/dashboard terkait data kemiskinan Kab.Sumba Tengah. Hal ini bisa dikerjasamakan dengan Dinas Kominfo.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah	Forum sinkronisasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di berbagai OPD agar terjadi keselarasan
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah	Forum dan kegiatan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan OPD
		Kajian Evaluasi ketepatan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan	Penelitian tentang ketepatan sasaran penerima padan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan OPD. Kajian ini bisa bekerjasama dengan OPD-OPD yang memiliki program-program penanggulangan kemiskinan
		Kolaborasi pengentasan kemiskinan dengan stakeholders (swasta, BUMN, masyarakat)	Membangun kemitraan dengan pihak swasta, BUMN dan Masyarakat untuk Menyusun rencana bersama dalam pengentasan kemiskinan.
2	Dinas Sosial dan PPA	Sosialisasi/kampanye budaya malu dianggap miskin	Kegiatan ini bertujuan untuk merubah mindset/ mental miskin Masyarakat Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan ini perlu melibatkan tokoh agama/tokoh Masyarakat.
		Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin berdasarkan data DTKS	Kegiatan bisa dilakukan dengan mendatangi langsung Masyarakat yang terdata dalam DTKS, lalu Dinsos juga perlu membuka portal pengaduan bagi Masyarakat yang menemukan kejanggalan atas data Masyarakat miskin yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini bisa dilakukan berbarengan dengan Dinas Kesehatan serta melibatkan Dinas PMD, Kecamatan dan Desa
		Kajian/Evaluasi efektivitas program bantuan sosial (PKH, BLT, dll)	Kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas berbagai program bantuan social/bantuan langsung yang diberikan pemerintah terhadap

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
			peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.
3	Dinas Kesehatan	Jamkesda	Program perlindungan Kesehatan Masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap Masyarakat yang tidak tercakup dalam program JKN-KIS
		Verifikasi dan validasi data Masyarakat miskin penerima bantuan JKN KIS/Jamkesda	Memastikan ketepatan data Masyarakat miskin yang menjadi sasaran penerima bantuan JKN KIS/Jamkesda. Kegiatan ini bisa bekerjasama dengan BPJS dan dilakukan berbarengan dengan Dinas Sosial serta melibatkan Dinas PMD, Kecamatan dan Desa.
		Kajian/evaluasi implementasi JKN-KIS/Jamkesda untuk Masyarakat Miskin	Kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan layanan Kesehatan melalui JKN KIS/Jamkesda khususnya oleh Masyarakat miskin atau sejauhmana pengaruh JKN/KIS dan Jamkesda mengurangi pengeluaran Masyarakat.
4	Dinas Peternakan	Bantuan ternak Kambing, Babi, Sapi, Kerbau dan Kuda kepada kelompok peternak	Pemberian bantuan berupa anak kambing/babi/sapi/kerbau/kuda untuk digembalakan oleh Masyarakat sampai bisa berkembang/berkembang biak. Pemberian bantuan ini sebaiknya berbasis kelompok, bukan individual.
		Pelatihan pembuatan produk olahan hasil ternak	Pelatihan untuk meningkatkan kreativitas Masyarakat dalam mengolah hasil produksi ternak menjadi produk yang bernilai tambah seperti misalnya nugget, bakso, susu, yogurt, dll. Supaya terfokus pelatihan bisa diberikan pada kelompok peternak yang tadi diberikan bantuan ternak.
		Bantuan penyediaan alat-alat pengolahan produk peternakan	Memberikan bantuan peralatan seperti mesin penggiling daging, mesin pemerah susu sapi, dll
		Kerjasama pemasaran	Pendampingan kelompok peternak untuk mendapatkan jaringan/mitra Kerjasama untuk pemasaran hasil produk
5	Dinas Perikanan	Program pengelolaan perikanan tangkap	pembagian alat tangkap gillnet monofilamen, perahu/kapal penangkapan ikan, laminasi dan mesin, alat tangkap ikan teri, alat pemancingan ikan, alat tangkap ramah lingkungan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	sarana budidaya ikan air tawar (kolam pekarangan), sarana ikan air payau/bandeng, pembenihan rakyat

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
			dan kolam percontohan, Pelatihan budidaya ikan air tawar
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Sosialisasi Gemar Makan Ikan, Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Perikanan, Bantuan sarpras pengolahan hasil perikanan
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penyuluhan terkait teknik-teknik pertanian di musim kemarau	Kegiatan penyuluhan dan pendampingan terkait berbagai Teknik/inovasi yang dapat dilakukan petani di musim kering/kemarau
		Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal	Pelatihan untuk meningkatkan kreativitas Masyarakat (khususnya masyarakat miskin) dalam mengolah hasil pangan lokal agar bisa memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi.
		Bantuan penyediaan alat pengolahan pascapanen pada kelompok tani	Memberikan peralatan untuk memproses hasil pertanian setelah panen, guna meningkatkan kualitas dan nilai jual produk.contohnya : mesin pengering, mesin pemotong, mesin pengemas, dll.
		Festival pangan lokal	Pesta rakyat yang khusus menyediakan berbagai panganan khas Sumba Tengah. Selain untuk melestarikan budaya, kegiatan ini juga akan memberikan nilai tambah pada produksi pangan lokal serta dampak ekonomi bagi Masyarakat
7	Dinas Koperasi, UMKM Perindag	Pelatihan kewirausahaan	Pelatihan untuk mendorong dan meningkatkan jiwa wirausaha Masyarakat.
		Pelatihan pemasaran online/e-commerce	Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran online
		Pusat konsultasi dan pendampingan kewirausahaan	Forum/wadah/komunitas bagi para pelaku wirausaha pemula di Sumteng untuk bisa memperoleh ilmu/wawasan serta konsultasi dengan para pelaku wirausaha yang sudah berhasil/berpengalaman
		Kompetisi Kewirausahaan	Kegiatan kompetisi untuk merangsang jiwa wirausaha anak muda di Sumba Tengah. Pemenangnya nanti diberi bantuan modal wirausaha.
		Penciptaan sentra pemasaran terpadu	Menyediakan tempat pemasaran untuk menjual produk khas hasil produksi Masyarakat (misalnya : pusat oleh2 sumteng)
		Bazaar UMKM	Kegiatan pasar yang sengaja diadakan pada waktu dan tempat tertentu untuk mendorong pelaku UMKM.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
		Penguatan dan pendirian koperasi unit desa (KUD)	Upaya untuk mendorong kesejahteraan Masyarakat melalui peran serta koperasi
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Produk dan Budaya Unggulan khas Sumba Tengah	Program pembinaan kelompok Masyarakat untuk bisa menghasilkan berbagai produk khas dan pertunjukan budaya yang bisa menjadi unggulan Kab. Sumba Tengah, baik berupa kerajinan, makanan, pertunjukan, upacara adat, dll.
		Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata	Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata di desa wisata seperti misalnya pengembangan homestay, rumah makan, sanitasi, dan fasilitas lainnya. Pengembangan ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat.
		Festival Wisata Sumba Tengah	Kegiatan yang sengaja diadakan untuk mempromosikan objek wisata dan budaya Kab Sumba Tengah
		Beasiswa Bidang Pariwisata	Beasiswa bagi siswa berprestasi namun kurang mampu untuk melanjutkan studi di SMK/Perguruan Tinggi khusus jurusan pariwisata. Ini bertujuan untuk menyiapkan SDM unggul di bidang Pariwisata di Sumteng
		Promosi Wisata Sumba Tengah	Membangun portal promosi wisata berbasis web yang berisi informasi lengkap tentang objek wisata Kab.Sumba Tengah.
		Revitalisasi Nilai Budaya/Adat	Bertujuan untuk mengevaluasi aturan adat lokal yang mungkin sudah tidak sesuai dengan filosofi budaya dalam konteks lama atau dengan kebutuhan Masyarakat saat ini. Kegiatan dapat dilakukan dengan metode dialog/diskusi terbatas dengan mengundang tokoh adat maupun tokoh agama. Salah satu alternatif kebijakan yang perlu dihidupkan adalah kebijakan “3 gerakan moral” (Gerakan kembali ke kebuh, Gerakan hidup hemat, dan Gerakan desa aman)
9	Dinas PUPR	Pembangunan Rumah layak huni	Berupa bantuan untuk Masyarakat miskin untuk merenovasi rumah tinggalnya menjadi rumah yang layak dan aman untuk ditinggali
		Pembangunan Sanitasi	Bantuan untuk Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang layak bagi Masyarakat miskin
		Pembangunan sarana air bersih	Bantuan Pembangunan sarana air bersih bagi Masyarakat untuk

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
			mewujudkan pola hidup bersih dan sehat
		Peningkatan sarana infrastruktur ke lokasi objek wisata	Pembangunan jalan/jembatan menuju Lokasi objek wisata baru yang berpotensi akan mendatangkan arus wisatawan di masa mendatang. Kegiatan ini bisa berkoordinasi dengan dinas pariwisata
		Evaluasi efektivitas program pembangunan rumah layak huni dan pengaruhnya terhadap masyarakat miskin	Kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh Pembangunan rumah layak huni terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin
		Pembangunan embung dan penampungan air	Pembangunan infrastruktur untuk menampung air yang dapat dimanfaatkan petani sebagai sumber air di musim kemarau. Kegiatan ini bisa bekerjasama dengan dinas pertanian
10	Dinas PMD	1 Desa 1 BUMDes	Kegiatan pendampingan untuk mendorong setiap desa agar bisa mempunyai 1 BUMDes produktif yang bisa memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat desa.
		Penyelarasan program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten	Menfasilitasi kegiatan penyelarasan program pengentasan kemiskinan yang direncanakan oleh Pemerintah Desa dengan Program dari OPD di tingkat Kabupaten
		Monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan di desa	Monev berbagai program bantuan bagi Masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa misalnya terkait ketepatan sasaran penerima program, efektivitas program, dll.
11	Dinas PPO	Wajib belajar 12 Tahun	kebijakan yang mewajibkan anak-anak usia sekolah untuk wajib sekolah minimal sampai lulus SMA.
		Sekolah gratis untuk SD dan SMP	Program untuk menjamin pembiayaan pendidikan di SD dan SMP tanpa biaya bagi siswa. Pemerintah daerah memberikan bantuan langsung kepada satuan pendidikan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
		Bantuan biaya pendukung pendidikan bagi siswa berprestasi (SD dan SMP)	Bantuan berupa uang tambahan yang diberikan kepada para siswa SD dan SMP berprestasi guna meningkatkan motivasi siswa untuk terus bersekolah.
		Rehabilitasi sarana prasarana sekolah	Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman
		Peningkatan kualitas guru	Pengembangan kompetensi dan kualifikasi guru melalui pelatihan dan Pendidikan formal

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
		Sosialisasi Layanan Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C)	Kegiatan mensosialisasikan paket A,B, dan C kepada para Masyarakat yang sudah putus sekolah agar ke depan mereka bisa memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah
		Pendampingan untuk mendapatkan akses beasiswa bagi siswa SMA/Mahasiswa	Fasilitasi dan pendampingan bagi siswa/mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan studinya dengan fasilitas beasiswa.
		Bus Sekolah/Mobil Jemputan	Penyediaan sarana transportasi mobil jemputan bagi siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah
12	Dinas transmigrasi, tenaga kerja PM dan PTSP	Pelatihan vokasi/keterampilan	Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan Masyarakat dalam bidang tertentu yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja/wirausaha. Untuk menyelenggarakan pelatihan ini bisa bekerjasama dengan LPK yang sudah terhubung dengan DUDI (baik di dalam/luar negeri) agar lulusan bisa langsung diserap.
		Bursa Kerja	Kegiatan untuk mempertemukan pencari kerja dengan Perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan. Kegiatan bisa dilakukan melalui event yang sengaja diadakan atau melalui media social/website.
		Promosi penanaman modal	Bisa dilakukan melalui platform digital seperti website atau media social, atau mengadakan/mengikuti pameran investasi atau melakukan kunjungan langsung pada calon investor untuk memperkenalkan potensi daerah sumba Tengah seperti pariwisata, peternakan, dll
13	Dinas Dukcapil	Penerbitan/pembaruan KK, akte kelahiran dan KTP bagi warga miskin	Membantu masyarakat miskin yang belum memiliki dokumen kependudukan. Hal ini dilakukan agar mereka bisa terdata jika selama ini belum terdata sebagai Masyarakat miskin
14	Dinas Perhubungan	Penyelesaian Pembangunan terminal	Keberadaan terminal bisa memicu munculnya aktivitas perekonomian di suatu daerah, karena dengan adanya terminal akan mempermudah akses transportasi masyarakat.
15	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Bantuan sosial beasiswa pendidikan (Program beasiswa abadi)	Beasiswa bagi anak-anak berprestasi namun kurang mampu di tingkat perguruan tinggi

B. Tema Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dilakukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing daerah (IDSD). Pada tahun 2023 skor IDSD Kabupaten Sumba Tengah berada pada skor 2,64. Skor ini berada di bawah skor IDSD Provinsi Nusa Tenggara Timur 3,42 dan Nasional 3,44 (BRIN, 2023).

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menetapkan beberapa target dan capaian Pemerintah dalam hal investasi seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Target ini menjadi dasar bagi pemda untuk melakukan aktivitas. Adapun target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Target Peningkatan Investasi di Kabupaten Sumba Tengah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline (2021)	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Kinerja Akhir Periode
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten (%)	8,00	10,00	12,50	15,00	15,00
2	Kegiatan promosi penanaman modal (Keg)	1	1	1	1	1
3	Cakupan waktu pelayanan perijinan (Jam)	120	80	60	40	40
4	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah (%)	na	15,00	20,00	25,00	25,00
5	Cakupan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (%)	na	20,00	30,00	40,00	40,00

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah

Adapun realisasi pelaksanaan investasi di Kabupaten Sumba Tengah baik investasi dari dalam negeri dan investasi asing dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada investasi asing, informasi dari OPD terkait bahwa data di BPS Provinsi NTT masih belum update. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di NTT, nilai investasi asing di Kabupaten Sumba Tengah terbilang masih minim. Termasuk jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya yang ada di Pulau Sumba, Sumba Tengah paling kecil nilai dan proyek investasi asingnya.

Sedangkan untuk investasi dalam negeri lebih tinggi dibandingkan investasi asing di Kabupaten Sumba Tengah. Nilai investasi dalam negeri Sumba Tengah masuk dalam kategori menengah ke bawah. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya di Pulau Sumba, Sumba Tengah dan Sumba Barat bergantian berada pada urutan terbawah. Nilai investasi dan jumlah proyek investasi dalam negeri di Kabupaten Sumba Tengah dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 9. Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)								
	Investasi (US \$)				Investasi (Rp)				Proyek
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021 2022 2023
Sumba Barat	552508	680	2328885	8066522685	976731000	34467500000	5	10	37
Sumba Timur	1883591	4775	38939209	27500428106	6852412000	576300300000	8	37	50
Kupang	-	1388	30185514	-	1991350000	446745600000	-	18	74
Timor Tengah Selatan	-	56	2808088	-	79786000	41559700000	-	2	125
Timor Tengah Utara	-	-	4790554	-	-	70900200000	-	-	61
Belu	-	-	3124054	-	-	46236000000	-	-	346
Alor	762909	809	544101	11138476241	1160628000	8052700000	18	32	22
Lembata	1375490	95	709959	20082152620	136612	10507400000	14	5	91
Flores Timur	856895	2045	252007	12510665038	2935436000	3729700000	38	25	17
Sikka	920512	72	1307642	13439476358	104181000	19353100000	1	11	85
Ende	42940979	23369	696304	626938299156	33535089000	10305300000	15	6	31
Ngada	-	-	1323122	-	-	19582200000	-	-	88
Manggarai	10861804	-	5726061	158582330902	-	84745700000	-	-	193
Rote Ndao	3494384	1329	2031115	51017998727	1906828000	30060500000	44	53	22
Manggarai Barat	16715992	22423	66236291	244053485300	32177723000	980297100000	209	310	408
Sumba Tengah	76118	2634	-	1111326650	3779934000	-	2	3	-
Sumba Barat Daya	1382264	5828	768831	20181048335	8363611000	11378700000	16	25	34
Nagekeo	1241619	1639	-	18127631054	2352696000	-	7	7	-
Manggarai Timur	-	-	1076014	-	-	15925000000	-	1	18
Sabu Raijua	-	-	682784	-	-	10105200000	-	-	10
Malaka	-	-	1875054	-	-	27750800000	-	-	17
Kota Kupang	2623087	6174	64808061	38297066118	8859833000	959159300000	26	49	621

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

Tabel 10. Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)								
	Investasi (US \$)				Investasi (Rp)				Proyek
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021 2022 2023
Sumba Barat	5143455	174	2328885	75094435920	2503000000	34467500000	37	9	37
Sumba Timur	34339312	65198	38939209	501353958558	935592000000	576300300000	120	48	50
Kupang	106245897	71042	30185514	1551190098275	1019453000000	446745600000	41	54	74
Timor Tengah Selatan	8390418	2041	2808088	93300107047	29295000000	41559700000	374	148	125
Timor Tengah Utara	679358	5273	4790554	9918620000	15671000000	70900200000	31	53	61
Belu	537606	1127	3124054	7849050000	16175000000	46236000000	17	20	346
Alor	753809	49	544101	11005611714	700000000	8052700000	16	5	22
Lembata	260051	2752	709959	3796744668	39491000000	10507400000	2	67	91
Flores Timur	7782	688	252007	113618552	9863000000	3729700000	1	140	17
Sikka	8360	1627	1307642	122053771	23341000000	19353100000	66	125	85
Ende	42984	311	696304	627565865	4456000000	10305300000	10	16	31
Ngada	6608720	2250	1323122	96467397038	32283000000	19582200000	33	65	88
Manggarai	10861804	6199	5726061	158582330902	88954000000	84745700000	82	101	193
Rote Ndao	3877734	1872	2031115	56614909980	26872000000	30060500000	40	41	22
Manggarai Barat	10115456	21680	66236291	147685656434	311103000000	980297100000	220	173	408
Sumba Tengah	1578627	1407	-	23047948350	20185000000	-	7	36	-
Sumba Barat Daya	9123931	5807	768831	133209396967	83334000000	11378700000	104	79	34
Nagekeo	1207333	4175	-	17627065305	59907000000	-	30	24	-
Manggarai Timur	3832757	1039	1076014	5598244669	14905000000	15925000000	109	30	18
Sabu Raijua	949058	76	682784	13856250000	1097000000	10105200000	44	6	10
Malaka	759120	578	1875054	11083153352	8297000000	27750800000	4	6	17
Kota Kupang	84813137	45705	64808061	1238271804481	655870400000	959159300000	328	503	621
Nusa Tenggara Timur	288136714	241070	230213649	4206796021848	3399347400000	3407162000000	1716	1747	2350

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan target yang dituangkan dalam RPD terkait peningkatan investasi tidak dapat diidentifikasi karena angka investasi dalam negeri dan luar negeri di NTT berdasarkan data

dari BPS belum tercantum secara utuh karena ada kendala internal OPD dalam menginput nilai investasi di Kabupaten Sumba Tengah. Apabila hanya melihat nilai yang tertera, tentu dapat disimpulkan bahwa nilai investasi di Sumba Tengah mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Cakupan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik hingga tahun 2024 masih sekitar 20% dari total layanan. Dengan penggunaan OSS tentu proses pelayanan perizinan dan penanaman modal bisa lebih terpantau dan pasti. Dengan adanya OSS ini juga proses pemantauan lebih mudah dilakukan oleh dinas terkait kepada seluruh investor. Tujuan dari OSS menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu agar pelaksanaan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta dalam pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila cakupan masih rendah tentu target monitoring juga relative lebih sulit dilakukan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan investasi, OPD terkait telah melakukan aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Sumba Tengah.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Membuat Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Peta potensi yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, fokus saat ini di Selatan adalah pariwisata, di Kecamatan Kondamaloba. Sedangkan di bagian utara berkaitan dengan EBT. Di Mamboro untuk Kawasan Industri Baru. Sedangkan untuk infrastruktur, yang dilakukan adalah peningkatan kualitas jalan yang sudah ada.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan: Dinas ini melakukan pembangunan pasar. Tahun 2024 anggaran untuk renovasi pasar dan penambahan 1 unit loss. Selain itu, pada bidang UMKM juga dilakukan pemberdayaan pelaku UMKM untuk fasilitasi sertifikasi produk usaha. Dinas melakukan pula peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk memastikan produk yang dihasilkan dari investasi dalam maupun luar negeri terdistribusi dengan baik.
- Bappelitbang menyusun *masterplan* pengembangan potensi di Sumba Tengah. *Masterplan* ini menjadi rujukan perencanaan untuk menarik investor dalam maupun luar negeri ke Sumba Tengah.
- Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu: Sudah membuat SOP pelayanan untuk proses perizinan berusaha di Kabupaten Sumba Tengah. Kepastian waktu dan prosedur yang harus diikuti oleh investor menjadi hal yang sangat penting dalam proses investasi.
- Dinas pariwisata dan kebudayaan: pengembangan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru seperti pengembangan rute wisata dan atraksi di taman nasional tersebut. Kemudian dilakukan pula pemasaran pariwisata Kabupaten Sumba Tengah melalui berbagai media. Selain itu, dilakukan pula penyelenggaraan seni dan budaya dan pembinaan sanggar seni yang ada di Kabupaten Sumba Tengah.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi asing ke Indonesia menurut World Economic Forum (WEF), yaitu infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, keterbatasan akses dana, kebijakan tidak stabil, regulasi tenaga kerja tidak kondusif, regulasi perpajakan tidak kondusif, kurang tenaga kerja terdidik, inflasi, korupsi, regulasi uang asing, pemerintah yang tidak stabil, pajak terlalu besar, etos kerja tenaga kerja yang rendah, kriminal dan pencurian (WEF, 2007). Beberapa permasalahan di atas juga menjadi masalah di lingkup lokal, Kabupaten Sumba Tengah.

Sumba Tengah merupakan salah satu Kabupaten Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh daerah tertinggal adalah akses atau infrastruktur yang masih belum memadai. Berdasarkan laporan WEF yang telah disebutkan di atas bahwa kualitas infrastruktur yang tidak memadai menjadi faktor penghambat masuknya investasi.

Selain itu, berbagai tantangan dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Sumba Tengah. Sumber daya manusia lokal menjadi salah satu faktor yang membuat investor enggan berinvestasi di Kabupaten Sumba Tengah. Perusahaan yang menanamkan modal di Kabupaten Sumba Tengah mengalami hasil panen banyak yang hilang. Tentu ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu, etos kerja pekerja juga masih rendah. Jam kerja tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, kurang dari jam kerja yang seharusnya.

Kejadian ini terjadi pada usaha perusahaan jagung. Kelemahan lainnya di Kabupaten Sumba Tengah adalah keamanan. Pegawai yang direkrut untuk bekerja di Perkebunan jagung tersebut telah menerima gaji dari perusahaan tapi hasil produksi ada yang dijual secara gelap. Perusahaan hanya bertahan 2-3 tahun saja. Tentu ini merugikan pemda dan Masyarakat Sumba Tengah sendiri.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya modal dan inisiasi untuk menjaga keberlanjutan produksi. Beberapa usaha menengah yang sedang tumbuh hanya mengandalkan bahan yang tersedia di hutan. Para pengrajin tidak melakukan budidaya untuk memastikan ketersediaan bahan baku dengan maksimal. Ini berdampak pada kurangnya ekspansi pasar untuk memasarkan produk tersebut. Dengan keterbatasan tersebut, akhirnya para pengrajin berharap pada dana desa untuk membantu proses usaha. Padahal berdasarkan hasil pemasaran yang telah dijalani, cukup banyak konsumen yang tertarik bahkan beberapa hotel di Sumba juga bersedia menjadi pasar produk UMKM. Apabila bisa dipastikan ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan produksi dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk mau mengembangkan proses produksi dan pemasaran produk UMKM tersebut.

Terbatasnya networking dengan pihak luar. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum menemukan platform untuk menjalin networking dengan investor, baik dalam maupun luar negeri. Kabupaten Sumba Tengah sudah Menyusun RDTR dan master plan pengembangan

potensi daerah yang menjadi panduan untuk mengundang investor mau menanamkan modal di Kabupaten Sumba Tengah. Tanpa networking yang baik, tentu sulit untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Sumba Tengah.

Tabel 11. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Tema Peningkatan Investasi

OPD	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana RB Tematik
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Program pengembangan iklim penanaman modal	• Masyarakat lokal (tenaga kerja lokal) yang kurang siap dengan investasi skala besar	• Berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menjamin keamanan berinvestasi.
Dinas Pekerjaan Umum		• Masalah infrastruktur yang masih belum memadai	• Fokus peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk wilayah potensial
Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan		• Keberlanjutan usaha produk lokal/ skala produksi yang masih rendah • Masing-masing OPD masih berkerja secara parsial.	• Pelatihan manajerial usaha bagi pelaku usaha produk local. • Bekerja sama dengan dinas pertanian/ perikanan/ peternakan untuk upaya budidaya produk unggulan.
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	program promosi penanaman modal	• Masalah networking dengan pemilik modal	• Terlibat aktif dalam forum-forum investasi nasional maupun internasional atau menggelar <i>investment forum</i> • Menyusun paket investasi yang menarik bagi calon investor
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	program pelayanan penanaman modal	Kepastian waktu layanan, informasi layanan, penggunaan OSS	• Mendorong penggunaan Sistem OSS yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengajuan izin usaha dan investasi secara daring • Melakukan reviu prosedur perizinan dan penanaman modal. • Membuat layanan informasi investasi dan layanan pengaduan.
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		• Pembuatan sistem monitoring penanaman modal

OPD	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana RB Tematik
Bappelitbangda	Penyusunan Masterplan pengembangan investasi di Sumba Tengah	-	Monitoring pelaksanaan masterplan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Atraksi wisata yang masih minim dan diversifikasi wisata masih rendah	Upaya eksplorasi atraksi wisata yang ada di Sumba Tengah.

Deskripsi Rencana Program RB Tematik Peningkatan Investasi :

- Permasalahan kehilangan hasil produksi dari investor dapat dicegah dan penyelesaian dengan aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian kerja sama antara tiga pihak yaitu aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak investor untuk menjamin rasa aman berinvestasi bagi para investor. melalui penyelesaian konflik secara cepat dan efektif
- Peningkatan infrastruktur di wilayah potensial. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan utama hampir di seluruh pemerintah daerah, termasuk Sumba Tengah. Oleh karena itu, fokus Pembangunan infrastruktur di wilayah potensial untuk investasi menjadi alternatif strategis. Kebutuhan Pembangunan jalan, ketersediaan air/ listrik, jaringan seluler dan kebutuhan lainnya menjadi fokus penggunaan APBD Sumba Tengah.
- Untuk menarik investor proses dari hulu sampai hilir perlu diperhatikan. Proses mengolah bahan baku menjadi produk olahan merupakan permulaan yang sangat baik. Tetapi perlu ada tahapan lain yang perlu diperhatikan seperti menjamin ketersediaan bahan baku untuk proses produksi yang berkelanjutan. Tentu proses budidaya sangat penting agar bahan baku tetap tersedia, apabila hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku di hutan tentu sulit menjamin keberlanjutan proses produksi. Apabila produksi bisa dilakukan dengan skala yang lebih besar, maka pasar juga bisa diperluas. Dengan terjaminnya proses hulu sampai hilir dapat menarik minat investor berinvestasi di produk tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan manajerial untuk pengelola usaha produk olahan tersebut untuk memastikan rantai pasok berjalan baik dan dapat memperluas ekspansi pasar. Dalam hal memastikan ketersediaan bahan baku, perlu berkolaborasi dengan dinas terkait untuk berjalannya proses budidaya.
- Perlu dibuat paket investasi yang menarik dengan proposal yang menjanjikan sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Sumba Tengah. Paket yang ditawarkan bukan hanya menawarkan lokasi atau produk unggulan saja tetapi juga insentif yang diterima oleh investor, pembagian peran dengan pemerintah daerah, sampai estimasi benefit yang akan diterima oleh investor. Paket investasi tersebut disampaikan melalui berbagai kegiatan *investment forum* di level nasional maupun internasional. Atau pemerintah Kabupaten Sumba Tengah juga dapat mendorong Pemerintah Provinsi NTT mengundang beberapa investor atau menginisiasi pelaksanaan *investment forum*.
- Sistem monitoring pelaksanaan penanaman modal yang masuk dalam OSS perizinan dan penanaman modal untuk memantau pembuatan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) mulai dari verifikasi, pemeriksaan kepatuhan, evaluasi kinerja investasi sampai rencana tindak lanjut untuk perbaikan.
- Dokumen pengembangan investasi yang telah disusun oleh Bappelitbang perlu diimplementasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala untuk menjamin tujuan pengembangan investasi di Kabupaten Sumba Tengah tercapai.
- Peningkatan daya tarik destinasi wisata saat ini telah dilakukan di Taman Nasional Manupeu Tanah Daru. Sementara beberapa Pantai di bagian Selatan Sumba Tengah juga sudah mulai

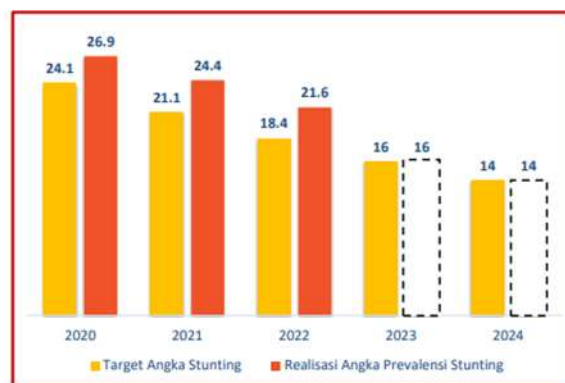
dieksplor. Namun, atraksi yang ditawarkan masih minim. Selain itu, promosi pariwisata di Sumba Tengah juga masih belum maksimal sehingga belum banyak investor yang mengetahui potensi pariwisata Kabupaten Sumba Tengah.

C. Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintah (Penurunan Stunting)

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan (Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting). Stunting merupakan masalah yang masih menjadi prioritas penyelesaian diseluruh wilayah Indonesia. Khususnya wilayah dengan tingkat perekonomian yang rendah.

Hasil survey status gizi Indonesia oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa realisasi angka prevalensi stunting selalu berada diatas target angka stunting yang telah ditetapkan. Hal ini berarti target penurunan angka prevalensi stunting Indonesia belum tercapai. Angka prevalensi stunting dihitung dari persentase jumlah balita stunting yang ada di suatu populasi dibandingkan dengan jumlah total balita yang ada di populasi yang sama. Prevalensi stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan diketahui bahwa secara nasional pada tahun 2022 realisasi angka prevalensi stunting adalah sebesar 21,6% sedangkan targetnya 18,4%. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi penurunan angka stunting masih jauh dari target yang ditentukan. Berikut perbandingan target dan realisasi angka prevalensi stunting di Indonesia menurut SSGI :



Grafik 4. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Prevalensi Stunting Nasional

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Selanjutnya jika kita melihat kondisi angka prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2021-2023, diketahui bahwa terdapat angka yang sangat bervariasi antara masing-masing kabupaten/kota yaitu berkisar di angka prevalensi 7-33%. Dari semua data Kabupaten/Kota tersebut juga terlihat ada yang mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir dan ada juga yang mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Berikut

data jumlah kasus stunting dan persentase stunting di provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota.

Tabel 12. Jumlah dan Persentase Balita Stunting Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumba Barat Daya	6360	31	8270	24	9762	32
Timor Tengah Selatan	13123	32	11642	28	8924	22
Timor Tengah Utara	5204	25	5280	24	4555	23
Kota Kupang	3068	26	5497	22	4019	17
Kupang	6674	22	6118	20	3872	13
Manggarai	4841	19	4313	16	3481	13
Sikka	3947	18	3174	14	3318	15
Flores Timur	3696	21	3412	19	3184	18
Rote Ndao	3103	23	3011	22	2764	20
Sumba Timur	3774	19	3478	15	2677	12
Malaka	3230	21	2582	16	2409	16
Manggarai Timur	3052	14	2408	10	2195	9
Belu	3171	18	2473	14	1984	11
Manggarai Barat	3495	15	3675	16	1901	8
Alor	3149	19	2119	12	1773	10
Sumba Barat	2079	24	2611	23	1291	12
Ende	2775	14	1749	9	1241	7
Sabu Raijua	2037	25	1496	18	1230	15
Lembata	1804	22	1398	16	1045	12
Ngada	1222	12	1027	9	902	8
Nagekeo	991	9	946	8	728	7
Sumba Tengah	559	8	659	9	549	7

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Sumba Tengah ternyata termasuk daerah yang memiliki jumlah balita stunting dan persentase kasus stunting paling sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang lain yang ada di NTT. Hal ini tentu cukup menggembirakan. Walaupun Kabupaten Sumba Tengah adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi namun untuk masalah stunting Kabupaten ini lebih baik dibanding Kabupaten/Kota lainnya di NTT.

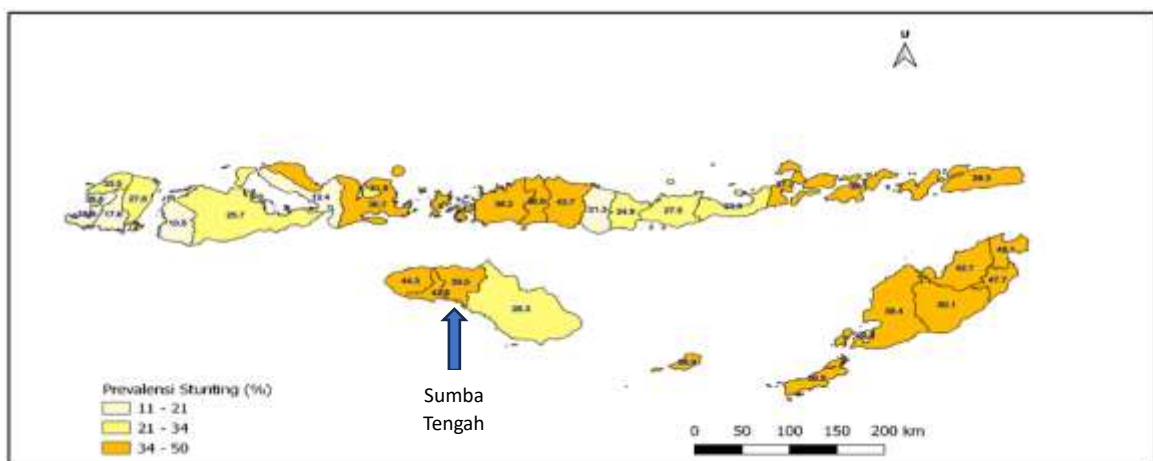
Angka prevalensi stunting yang ada di tabel tersebut hampir sama dengan angka prevalensi stunting yang kami dapatkan dari bahan paparan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang berjudul “Strategi dalam Menurunkan Angka Stunting dan Gizi Buruk di Provinsi NTT” yang disampaikan dalam pertemuan bimtek Penyiapan dan Penyusunan Materi Pimpinan di Kupang pada bulan September 2023. Menurut bahan tersebut disampaikan bahwa jumlah balita stunting per Agustus 2023 ada sebanyak 549 orang atau dengan persentase 7,3% (Dinkesdukcapil Provinsi NTT, 2023). Data ini beliau ambil dari data ePPGBM per 10 September 2023. EPPGBM adalah singkatan

dari aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Aplikasi ini dapat merekam data individu dan hasil penimbangan terutama di Posyandu secara rinci by name by address. Selanjutnya hasil input data tersebut diolah menjadi status gizi.

Namun dalam FGD yang dilakukan dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Sumba Tengah menyampaikan data yang sangat berbeda dengan data yang ada di tabel diatas. Mereka menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting pada Bulan Agustus 2023 adalah 14,5% dan bulan Februari 2024 naik lagi menjadi 14,7%. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara data Dinkes Sumba Tengah dengan data Dinkesdukcapil Provinsi NTT.

Berdasarkan penelusuran, ternyata perbedaan data prevalensi stunting ini banyak terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan karena saat ini terdapat beberapa sumber data yang menjadi acuan prevalensi stunting diantaranya ada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Perbedaan data antara E-PPGBM dan SSGI memiliki selisih hampir 5-10% bahkan ada yang lebih dari 10% (kemenkopmk.go.id, 2023). Perbedaan data itu salah satunya disebabkan oleh berbedanya metode pengukuran kedua data tersebut. SSGI menggunakan metode survei, jadi tidak semua balita dilakukan pengukuran/penimbangan. Sedangkan untuk EPPGBM semua balita yang ada di suatu daerah diukur dan ditimbang.

Selain itu kami juga menemukan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan yang juga menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. SKI merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan SSGI. Dalam laporan SKI 2023 disebutkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 adalah 39,5% dari 161 balita yang tertimbang. Berikut gambaran angka prevalensi stunting di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara yang sudah diolah oleh (Riza Singrapati & Astuti, 2024).



Gambar 1. Prevalensi Stunting di Nusa Tenggara Tahun 2023
Sumber : (Riza Singrapati & Astuti, 2024)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat 3 versi data prevalensi stunting dari 3 sumber data yang berbeda yaitu :

Tabel 13. Perbandingan Data Prevalensi Stunting Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 dari Berbagai Sumber Data

Sumber Data	EPPGBM 2023	SKI 2023	Dinkes Kab. Sumba Tengah 2023
Prevalensi Stunting	7,3%	39,5%	14,5%

Sumber : data diolah dari berbagai sumber

Adanya perbedaan data yang sangat signifikan ini tentu menjadi permasalahan dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumba Tengah. Data mana yang harus dijadikan acuan tentu akan sangat mempengaruhi intervensi yang perlu dilakukan ke depannya. Permasalahan ketidaksinkronan data stunting yang terjadi di banyak daerah ini mendorong kebijakan RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan difokuskan pada tema penurunan stunting.

Selain dalam RB Tematik, sebelumnya dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah juga telah menyusun 5 pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan angka stunting dimana salah satunya adalah penguatan dan pengembangan sistem, data dan informasi, riset dan inovasi. Dari berbagai kebijakan tersebut terlihat bahwa pemerintah sangat *concern* terhadap upaya sinkronisasi data dalam penanganan stunting.

Jika kita berbicara mengenai digitalisasi pemerintahan, pengembangan sistem, data dan informasi tentu ini semua akan mengarah pada Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Peraturan Presiden No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hingga tahun 2023 SPBE di instansi pemerintah belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dikeluarkan Kementerian PANRB, khususnya untuk Provinsi NTT, diperoleh hasil evaluasi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Evaluasi SPBE Provinsi NTT Tahun 2023 Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,83	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	1,91	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belu	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,09	Cukup
5	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Alor	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sikka	1,94	Cukup
8	Pemerintah Kab. Flores Timur	2,07	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ende	1,98	Cukup
10	Pemerintah Kab. Ngada	1,36	Kurang
11	Pemerintah Kab. Manggarai	2,68	Baik
12	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,40	Cukup
13	Pemerintah Kab. Sumba Barat	2,55	Cukup
14	Pemerintah Kab. Lembata	2,15	Cukup
15	Pemerintah Kab. Rote Ndao	2,99	Baik
16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,44	Baik
17	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,62	Baik
18	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1,68	Kurang
19	Pemerintah Kab. Nagekeo	1,77	Kurang
20	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1,58	Kurang
21	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	2,43	Cukup
22	Pemerintah Kab. Malaka	2,07	Cukup
23	Pemerintah Kota Kupang	2,20	Cukup

Sumber: Kementerian PANRB, 2023

Berdasarkan tabel 13 diatas, terlihat ada 5 Pemerintah Kabupaten di NTT yang mendapatkan nilai dengan Predikat “Baik”, lalu 13 Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh nilai dengan predikat “Cukup” dan 4 Pemerintah Kabupaten lainnya mendapatkan nilai dengan Predikat “Kurang”. Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota ini secara umum agak kontras dengan capaian Pemerintah Provinsi NTT yang memperoleh predikat “Sangat Baik”.

Khusus untuk hasil evaluasi Kabupaten Sumba Tengah, diketahui bahwa Kab. Sumba Tengah termasuk dalam 4 instansi pemerintah yang memiliki predikat “Kurang”. Bahkan dari segi nilai, Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan nilai paling rendah kedua setelah Kabupaten Ngada. Jika melihat hasil evaluasi ini maka tidak heran jika masih terdapat kekacauan data khususnya terkait data prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Tengah.

Walaupun upaya penguatan dan pengembangan sistem, data dan informasi terkait prevalensi stunting masih lemah di Kabupaten Sumba Tengah, namun berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa sudah banyak upaya lainnya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten ini. Jika merujuk pada Perpres No. 72 Tahun 2021 terdapat pilar-pilar lainnya yang bisa dilakukan instansi pemerintah misalnya : peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, peningkatan

komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan Masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi spesifik di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan Masyarakat.

Selanjutnya 5 pilar strategi percepatan penurunan stunting dioperasionalisasikan lagi ke dalam 8 aksi konvergensi yang berisi instrumen dalam bentuk kegiatan pemerintah Kab/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. 8 aksi tersebut terdiri dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa, Pembinaan KPM, Sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, reviu kinerja tahunan.

Terkait dengan berbagai kebijakan penanganan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah berupaya untuk melakukan 8 aksi konvergensi tersebut. Kabupaten Sumba Tengah juga telah memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari berbagai unsur. Dari sisi kebijakan, Bupati Sumba Tengah juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan terkait penanggulangan stunting diantara ada Perbup Sumba Tengah No. 12 Tahun 2019 tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Sumba Tengah dan juga Perbup Sumba Tengah No. 23 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumba Tengah.

Dalam peraturan tersebut telah diuraikan secara spesifik berbagai kegiatan intervensi yang perlu dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Intervensi dibedakan menjadi 2 yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang pada umumnya dilakukan pada sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. Sedangkan intervensi sensitif adalah intervensi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum. Berikut adalah beberapa program/kegiatan intervensi yang telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Sumba Tengah :

1. Intervensi Spesifik

Intervensi ini dilakukan pada sasaran remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Intervensi ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendekatan kesehatan. Namun pelaksana kegiatan ini ternyata bukan hanya Dinas Kesehatan atau Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tapi juga ada yang didanai oleh Pemerintah Desa, gereja, dll. Beberapa contoh kegiatan intervensi yang dilakukan adalah:

- a. Pemberian suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil
- b. Edukasi tentang pola makan sehat
- c. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil

- d. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) dan untuk balita gizi kurang
- e. Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita tiap bulan melalui Posyandu dan faskes lainnya
- f. Edukasi ASI eksklusif
- g. Screening anemia
- h. Screening tetanus toksoid
- i. Pendampingan balita gizi kurang
- j. Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk balita
- k. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dll.

2. Intervensi Sensitif

Intervensi ini dilakukan oleh OPD lainnya diluar OPD sektor kesehatan. Intervensi ini dilakukan untuk mencegah stunting secara tidak langsung dan bersifat jangka panjang. Beberapa contoh intervensi yang dilakukan adalah :

- a. Penyediaan infrastruktur air bersih
Keberadaan air bersih menjadi hal yang krusial. Khususnya di wilayah Sumba Tengah yang topografinya berbeda. Terdapat wilayah yang persediaan airnya sangat melimpah. Namun, disisi lain terdapat wilayah yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sehingga untuk mendukung program hidup sehat Dinas PUPR melakukan intervensi penyediaan air bersih.
- b. Bantuan ternak
Dinas Peternakan memberikan bantuan berupa hewan ternak yaitu ayam pedaging. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat agar bisa memberikan dampak ekonomi dan juga bisa berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Selain hewan ternak, Dinas Peternakan juga menyediakan telur segar dari ayam petelur yang mereka pelihara.
- c. Budidaya tanaman hortikultura
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran. Selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kegiatan ini diharapkan juga bisa memberikan pengaruh pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
- d. Pemberian benih ikan gratis pada kelompok budidaya
Program ini merupakan inisiasi Dinas Perikanan. Sama halnya dengan bantuan ternak, pemberian benih ikan ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat gizi bagi masyarakat yang menerimanya ketika benih ikan tersebut berkembang dan layak dikonsumsi.
- e. Peningkatan kompetensi guru PAUD
Peningkatan kompetensi dilakukan untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terkait pengetahuan stunting. Hal ini sebagai bentuk partisipasi guru dalam penanganan permasalahan stunting di lingkungan sekolah.
- f. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan
Program yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dan PPA ini selain bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, juga diharapkan bisa mencegah atau mengurangi kasus stunting di Kabupaten Sumba Tengah.

Pelaksanaan berbagai intervensi tersebut tentu tidak lepas dari beberapa kendala dan permasalahan. Beberapa kendala yang disampaikan OPD dalam kegiatan FGD yang lalu adalah:

- Dalam hal kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi dan balita di Sumba Tengah. Dalam pengukuran E-PPGBM seharusnya semua bayi dan balita yang ada di Sumba Tengah harus ditimbang dan diukur. Namun karena berbagai keterbatasan, dari total sekitar 7 ribuan balita yang ada di Sumba Tengah, belum semua balita tersebut ditimbang sehingga dikhawatirkan masih ada balita yang belum terpantau.
- Dalam pendampingan balita gizi kurang, peran orang tua akan menjadi faktor kunci keberhasilan. Namun sayangnya pemahaman orang tua terkait pola konsumsi dan pola asuh masih sangat rendah. Misalnya dalam pemberian makanan tambahan untuk anak stunting selama 90 hari sudah diberikan pola makan yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya orang tua tidak selalu mematuhi pola makan tersebut. Selain itu kesadaran orang tua untuk datang dan berkonsultasi ke posyandu atau faskes juga masih rendah.
- Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri juga belum bisa dikontrol 100%, karena tidak bisa dipastikan apakah tablet tersebut benar-benar sudah diminum atau tidak. Sehingga pengawasan dan evaluasi terhadap beberapa kegiatan intervensi spesifik ini dinilai masih lemah.
- Dari sisi kualifikasi dan kompetensi SDM, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB juga menyampaikan bahwa latar pendidikan SDM yang ada di OPDnya belum terlalu sesuai sehingga membutuhkan berbagai program pengembangan kompetensi.
- Masyarakat Sumba Tengah sudah banyak yang melakukan budidaya tanaman hortikultura, namun sayangnya kemauan mereka untuk mengkonsumsi sayur-sayuran hasil panen mereka masih rendah sehingga sebagian besar hasil panen tersebut dijual.
- Kesadaran masyarakat untuk menanam buah-buahan di pekarangan rumah juga masih kurang. Padahal dengan menanam dan mengkonsumsi buah-buahan juga bisa mencegah stunting.

Berdasarkan uraian berbagai program dan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumba Tengah, maka dalam tabel 15 berikut disusun beberapa rencana program yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting ke depannya:

Tabel 15. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)

OPD	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
Bapelitbangda	• Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	• Keterbatasan anggaran	• Koordinasi dan sinkronisasi data stunting • pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan penanganan stunting lintas OPD (TPPS) • koordinasi berkala terkait progress perkembangan penanganan stunting ke Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
Dinas Kesehatan	• Pemberian suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil • Edukasi tentang pola makan sehat • Pemeriksaan kesehatan ibu hamil • Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) dan untuk balita gizi kurang • Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita tiap bulan melalui Posyandu dan faskes lainnya • Edukasi ASI eksklusif • Screening anemia • Screening tetanus toksoid • Pendampingan balita gizi kurang	• Pengukuran belum menjangkau semua balita di Sumba Tengah (data stunting tidak update) • Pemahaman orang tua masih rendah terkait pola konsumsi dan pola asuh	• Pemberian suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil • Edukasi tentang pola makan sehat • Pemeriksaan kesehatan ibu hamil • Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) dan untuk balita gizi kurang • Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita tiap bulan melalui Posyandu dan faskes lainnya • Edukasi ASI eksklusif • Screening anemia • Screening tetanus toksoid • Pendampingan balita gizi kurang

OPD	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
	- Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk balita - Bantuan iuran (PBI) Jaminan kesehatan pada Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu		- Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk balita - Bantuan iuran (PBI) Jaminan kesehatan pada Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu - Pemeriksaan kesehatan calon pengantin - Edukasi reproduksi dan gizi pada calon pengantin - Kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan - Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ PIK-R) - Bina Keluarga Balita ber-KB	Latar belakang pendidikan SDM di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	- Menjadi PIC penurunan angka stunting kabupaten - Melakukan pembagian tugas ke seluruh OPD sesuai tugas masing-masing - Melakukan sinkronisasi dan updating data stunting - Bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk membangun satu data stunting - Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ PIK-R) - Bina Keluarga Balita ber-KB
Dinas Sosial	Bantuan sosial Program Keluarga Harapan/ PKH	Ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah	Bantuan sosial Program Keluarga Harapan/ PKH

OPD	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
	Bantuan pangan non tunai berupa beras kepada keluarga miskin dan rentan		Bantuan pangan non tunai berupa beras kepada keluarga miskin dan rentan
Dinas Peternakan	- Pemberian bantuan ternak (ayam pedaging) - Penyediaan telur segar langsung dari petelur	- Ketersediaan daging di Sumba Tengah tidak tersedia sepanjang tahun (Masyarakat hanya makan daging ketika ada acara adat, karena tidak ada yang menjual daging kiloan di Sumba Tengah) - Tidak ada rumah potong hewan	- Pemberian bantuan ternak produktif - Pemberian bantuan ternak konsumtif untuk keluarga terindikasi stunting - Pemberian bantuan telur untuk anak sekolah - Penyediaan fasilitas rumah potong hewan
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya : - Pemberian benih ikan pada kelompok budidaya - Pemberian kolam bioflok	Ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah	- Sosialisasi gemar makan ikan untuk anak-anak - Kolaborasi dengan dinas Pendidikan untuk pemberian makan siang gratis lauk ikan - Bantuan benih ikan pada kelompok budidaya - Bantuan kolam bioflok
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Budidaya tanaman hortikultura	Kemauan masyarakat untuk mengkonsumsi hasil tanaman hortikultura (seperti sayur-sayuran) rendah, kebanyakan hanya hanya dijual	- Budidaya tanaman hortikultura - Gerakan menanam buah di pekarangan - Kampanye gemar makan sayur - Menghidupkan kembali kebijakan “3 gerakan moral” (Gerakan kembali ke kebuh, Gerakan hidup hemat, dan Gerakan desa aman)

OPD	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
Dinas PUPR	• Penyediaan sarana air bersih pedesaan • Penyediaan akses sanitasi	• Kurangnya partisipasi masyarakat	• Penyediaan sarana air bersih pedesaan • Penyediaan akses sanitasi
Dinas Kominfo	• Program Informasi dan Komunikasi Publik : Publikasi kegiatan dalam rangka penurunan stunting	• SPBE di Kab. Sumba Tengah belum berjalan • Desain arsitektur SPBE belum dibuat • Kompetensi pegawai yang terkait digitalisasi pemerintahan belum merata • Keterbatasan anggaran	Program aplikasi Informatika : • Peningkatan kompetensi pegawai untuk sistem informasi/digitalisasi pemerintahan • Membangun sistem data sederhana berbasis elektronik • Membangun platform/dashboard data dan informasi stunting (satu data stunting)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Pemberian pelatihan tentang pola pengasuhan dalam menangani anak stunting	• Keterbatasan anggaran	• Pengembangan pendidikan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) pada lembaga PAUD • Pelatihan Pengasuhan Penanganan Stunting bagi guru PAUD • Pendataan anak/balita stunting atau beresiko di PAUD
Dinas PMD	• Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat seperti karang taruna, LPM, PKK, Posyandu		• Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (karang taruna, LPM, PKK, Posyandu) • Pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Desa

OPD	Program/Kegiatan Saat ini	Masalah	Rencana Program RB Tematik
			• Pendataan jumlah anak stunting per desa

Deskripsi Rencana Program RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah (Penurunan Stunting) :

Tabel 16. Deskripsi Rencana Program RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah (Penurunan Stunting)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
1	Bapelitbangda	Koordinasi dan sinkronisasi data stunting serta eksekusi lapangan	melakukan koordinasi dan sinkronisasi data stunting dengan melakukan pengecekan lintas instansi (khususnya antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan) sehingga muncul satu data yang valid dan dapat digunakan oleh seluruh OPD. Terkait eksekusi lapangan, memastikan dalam penanganan stunting tidak ada double peran antarinstansi.
		Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan penanganan stunting lintas OPD (TPPS)	pemantauan secara berkala dan mengevaluasi progress capaian penanganan stunting. Pemantauan dalam arti update data serta rencana tindak lanjut pasca data diperoleh
		koordinasi berkala terkait progress perkembangan penanganan stunting ke Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	melakukan pelaporan secara periodic update data stunting ke kepala daerah dan sekretaris daerah tujuannya agar intervensi stunting dalam dilakukan secara periodik
2	Dinas Kesehatan	Pemberian suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil	cukup jelas
		Edukasi tentang pola makan sehat	cukup jelas
		Pemeriksaan kesehatan ibu hamil	cukup jelas
		Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) dan untuk balita gizi kurang	cukup jelas
		Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita tiap bulan melalui Posyandu dan faskes lainnya	cukup jelas
		Edukasi ASI eksklusif	cukup jelas
		Screening anemia	cukup jelas
		Screening tetanus toksoid	cukup jelas
		Pendampingan balita gizi kurang	cukup jelas
		Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk balita	cukup jelas

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
		Bantuan iuran (PBI) Jaminan kesehatan pada Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu	cukup jelas
		Pemeriksaan kesehatan pra-nikah calon pengantin	Pemeriksaan yang dilakukan untuk mencegah permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan dan calon anaknya. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urine, dan pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu.
		Edukasi reproduksi dan gizi pada calon pengantin	Edukasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar atau konsultasi antara tenaga kesehatan dan calon pengantin.
		Kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan	Kampanye dilakukan di desa-desa yang belum memiliki akses sanitasi/jamban sehat
		Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kampanye dilakukan di desa-desa yang belum memiliki akses sanitasi/jamban sehat atau sarana air bersih
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menjadi PIC penurunan angka stunting kabupaten	Menjadi penanggung jawab penurunan angka stunting di kabupaten Sumba Tengah
		Melakukan pembagian tugas ke seluruh OPD sesuai tugas masing-masing	pembagian tugas penyelesaian masalah stunting ke masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsinya
		Melakukan sinkronisasi dan updating data stunting	update riil data stunting yang dapat digunakan oleh seluruh OPD
		Bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk membangun satu data stunting	mengembangkan sistem informasi satu data stunting
		Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ PIK-R)	wadah kegiatan yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja, untuk memberikan informasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga
		Bina Keluarga Balita ber-KB	Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak balita, memantau tumbuh kembang anak balita serta meningkatkan pengetahuan tentang KB kepada PUS yang belum ber-KB
4	Dinas Sosial dan PPA	Bantuan sosial Program Keluarga Harapan/ PKH	cukup jelas
		Bantuan pangan non tunai berupa beras kepada keluarga miskin dan rentan	cukup jelas

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
5	Dinas Peternakan	Pemberian bantuan ternak produktif	bantuan langsung pada peternak yang bertujuan untuk dikembangkan agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi
		Pemberian bantuan ternak konsumtif untuk keluarga terindikasi stunting	bantuan ternak untuk keluarga yang terindikasi memiliki anak dengan stunting dengan tujuan agar hewan ternak tersebut dapat dipelihara dan dikonsumsi di waktu tertentu
		Pemberian bantuan telur untuk anak sekolah	pemberian bantuan telur sebagai tambahan makanan anak sekolah baik PAUD/TK
		Penyediaan fasilitas rumah potong hewan	penyediaan fasilitas rumah potong hewan agar kebutuhan daging di Kabupaten Sumba Tengah dapat terpenuhi sepanjang tahun dan tidak menggantung dari kabupaten lain
		sosialisasi pola makan sehat dan bergizi	kegiatan kolaborasi dengan dinas Kesehatan untuk dapat menyosialisasikan makan sehat dan bergizi dengan makan daging, ayam dan telur.
6	Dinas Perikanan	Sosialisasi gemar makan ikan untuk anak-anak	sosialisasi dan kampanye gemar makan ikan untuk anak-anak agar kebutuhan gizi anak dapat tercukupi
		Kolaborasi dengan dinas Pendidikan untuk pemberian makan siang gratis lauk ikan	dukungan program nasional makan gratis dengan memberikan lauk ikan
		Bantuan benih ikan pada kelompok budidaya	pemberian bantuan benih ikan ke kelompok budidaya
		Bantuan kolam bioflok	pemberian bantuan pembuatan kolam bioflok pada kelompok budidaya
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Budidaya tanaman hortikultura	mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran baik untuk dijual maupun dikonsumsi
		Gerakan menanam buah di pekarangan	Gerakan untuk mendorong masyarakat untuk menanam 1 pohon buah di pekarangannya. Beberapa pilihan buah yang diyakini bisa mencegah stunting misalnya alpukat, jeruk, pisang, pepaya dll.
		Kampanye gemar makan sayur	Sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran akan manfaat sayur terutama anak-anak.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
		Menghidupkan kembali kebijakan “3 gerakan moral” (Gerakan kembali ke kebuh, Gerakan hidup hemat, dan Gerakan desa aman)	Yaitu gerakan moral yang dulu pernah dicanangkan Bupati Sumba Tengah, namun saat ini sudah terlupakan.
8	Dinas PUPR	Penyediaan sarana air bersih pedesaan	cukup jelas
		Penyediaan akses sanitasi	cukup jelas
9	Dinas Kominfo	Peningkatan kompetensi pegawai untuk sistem informasi/digitalisasi pemerintahan	program pengembangan pegawai agar memiliki kompetensi sistem informasi atau digitalisasi pemerintahan yang dapat menjalankan sistem informasi
		Membangun sistem data sederhana berbasis elektronik	pengembangan tata Kelola data berbasis elektronik secara sederhana yang memungkinkan dapat terjadi lalu lintas data dan berbagi data antar OPD
		Membangun platform/dashboard data dan informasi stunting (satu data stunting)	pembuatan platform sistem informasi data secara elektornik khususnya terkait stunting yang dapat mengkoneksikan seluruh OPD terkait
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pengembangan pendidikan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) pada lembaga PAUD	upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD-HI bertujuan menyediakan layanan bagi anak usia dini yang diselenggarakan secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan melalui komitmen semua unsur terkait
		Pelatihan Pengasuhan Penanganan Stunting bagi guru PAUD	Pembekalan bagi guru PAUD agar bisa memahami pola pengasuhan dalam penanganan anak stunting yang ada di PAUD
		Pendataan anak/balita stunting atau beresiko di PAUD	Menginstruksikan pada semua PAUD untuk melaporkan data anak stunting yang ada di semua PAUD
11	Dinas PMD	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (karang taruna, LPM, PKK, Posyandu)	Pemberdayaan berbagai lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang ada di desa-desa untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting
		Pendataan jumlah anak stunting per desa	Menginstruksikan pada semua desa untuk melakukan pendataan balita stunting dan berpotensi stunting di masing-masing desa secara komprehensif

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana Program RB Tematik	Deskripsi Singkat
		Pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Desa	Penetapan target masing-masing desa untuk menurunkan angka kasus stunting yang ada di desanya

D. Tema Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi sederhananya dengan menghitung harga barang konsumsi di satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun barang konsumsi dikategorikan dalam 11 kelompok diantaranya: kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, Listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok Kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok Pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Secara konseptual cara untuk mengendalikan inflasi dapat dilakukan dengan yang pertama, Kebijakan moneter yang ketat. Kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral agar uang yang beredar di Masyarakat dapat berkurang. Salah satu kebijakannya yaitu dengan memberikan suku bunga tinggi dan menjual surat berharga pemerintah; Kedua, Kebijakan fiskal yang ketat. Kebijakan yang bisa diambil pemerintah dengan meningkatkan pajak atau mengurangi subsidi; Ketiga, Pengendalian upah. Mengendalikan kenaikan upah yang terlalu cepat karena kenaikan upah memicu kenaikan konsumsi Masyarakat; Keempat, Intervensi pasar. Kebijakan untuk menstabilkan harga dengan menambah pasokan barang di pasar sehingga kenaikan harga bisa dijaga secara signifikan; Kelima, Peningkatan produksi dan produktivitas. Peningkatan produksi dan produktivitas bahan pokok bertujuan untuk memperbanyak pasokan barang dan jasa sehingga harga barang tidak terlampaui tinggi Ketika permintaan banyak karena ketersediaan barang banyak; Keenam, peningkatan investasi dan inovasi. Peningkatan investasi dan inovasi erat kaitannya dengan produktivitas barang dan jasa. Semakin banyak investasi maka ketersediaan barang dan jasa akan semakin melimpah dan beragam; Ketujuh, pendidikan dan kesadaran public. Kesadaran publik dan Pendidikan akan menghindarkan Masyarakat dari sikap FOMO atau panik yang berlebihan terhadap barang dan jasa.

Tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan September 2024 tercatat sebesar 1,07%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi pada periode yang sama untuk level kabupaten kota tertinggi adalah kota Kupang (2,17%) dan terendah (deflasi) Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,32%. Sedangkan untuk Kabupaten Sumba Timur sebesar 1,27%. Indeks inflasi Kabupaten Sumba Timur juga menjadi acuan dalam indeks inflasi Kabupaten Sumba Tengah. Sehingga kondisi di Sumba Tengah tidak

akan jauh berbeda dengan kondisi di Sumba Timur. Berikut adalah Gambaran inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur September 2023 hingga September 2024 yang mengalami penurunan signifikan.



Grafik 5. Tingkat Inflasi Provinsi NTT, September 2023- September 2024

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2024

Walaupun ukuran inflasi masih mengikuti Sumba Timur, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan beberapa strategi, yaitu:

- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan melakukan Pemantauan harga barang. Pemantauan harga barang bertujuan untuk melihat pergerakan harga barang. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan harga barang tidak terlampaui tinggi
- Bagian ekonomi melakukan operasi pasar bekerjasama dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Selain itu, dilakukan pula kegiatan Kerjasama dengan Bulog untuk menjual barang kebutuhan pokok dibawah harga pasar. Tujuannya agar menjaga kestabilan permintaan barang
- Dinas .. melakukan Himbauan larangan penimbunan barang. Himbauan agar para pedagang tidak melakukan penimbuna barang Ketika Masyarakat banyak membutuhkan barang tersebut
- Dinas Peternakan memberikan bantuan ternak. Bantuan ternak untuk rumah tangga miskin. Tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan tujuan lainnya agar pasokan hewan ternak tetap terjaga di Kabupaten Sumba Tengah.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengembangan hortikultura. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pariwisata. Saat ini dilakukan pengembangan tanaman hortikultura seperti bawang merah, sayur-sayuran. Sudah berjalan di 15 hektar dan sedang berproses 45 hektar.
- Dinas perikanan memberikan bibit ikan untuk Masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan protein. Tetapi saat ini hanya bisa berjalan selama satu siklus saja, belum ada keberlanjutan dari inisiatif yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Dalam upaya melakukan pengendalian inflasi, secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak terlalu banyak menghadapi kendala. Inflasi terjadi pada saat hari raya

agama maupun tahun baru. Namun dalam operasional sehari-hari beberapa kendala yang ditemui adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah kesulitan untuk operasi pasar karena tempat penampungan yang kurang. Distribusi barang yang tidak merata karena tidak adanya tempat penampungan barang yang memadai di Sumba Tengah
- Tidak ada keterbukaan antara Perusahaan dengan pemerintah. Pihak swasta tidak menyampaikan secara akurat barang yang akan diperjualbelikan di Kabupaten Sumba Tengah. Sehingga pemerintah tidak memiliki data valid jumlah supply barang yang masuk ke Sumba Tengah
- Posko untuk mengecek alur barang masuk dan keluar komoditi sudah tidak maksimal. Posko untuk pengecekan di lokasi perbatasan untuk melihat muatan barang yang masuk dan keluar sudah tidak berfungsi. Tidak ada penjaga posko yang melihat jumlah barang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Sumba Tengah.
- Peralatan kemetrolagian masih harus menggunakan peralatan dari Sumba Timur. Kabupaten Sumba Tengah masih belum memiliki alat untuk tera/ tera ulang alat ukur, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Padahal keberadaan alat ini sangat krusial untuk mengetahui dengan akurat jumlah konsumsi masyarakat di Sumba Tengah dan juga memberikan kepastian kepada konsumen.

Berikut adalah matriks permasalahan yang dihadapi oleh OPD di Kabupaten Sumba Tengah dan usulan program untuk RB tematik.

Tabel 17. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Tema Pengendalian Inflasi

OPD	Program	Masalah	Rencana Program RB Tematik
Bapelitbangda	• Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	• Ketersediaan barang pokok dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi belum mampu melayani (minus)	• Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan optimalisasi produksi bahan pokok lokal
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag	• pemantauan harga barang kebutuhan pokok (laporan perhari), database siabang kepo • program pengembangan fasilitas pasar (pasar dan parkir) • penera ulang SPBU • pemberian surat himbauan untuk tidak menimbun bahan makanan dan edaran untuk belanja dipasar	• Banyak masuk barang dari luar sumba tengah sehingga kontrol terhadap harga barang susah dilakukan • Keterbatasan anggaran • Keterbatasan tenaga ahli internal untuk menera ulang SPBU	• Pemantauan harga barang dan stok barang kebutuhan pokok (laporan perhari) • Program pengembangan fasilitas pasar (pasar dan parkir) • Pemberian surat himbauan untuk tidak menimbun bahan makanan dan edaran untuk belanja dipasar • Pengembangan kompetensi pegawai untuk penera ulang SPBU • pengadaan tera/ tera ulang alat ukur, takar, timbang dan peralatannya (UTTP)

OPD	Program	Masalah	Rencana Program RB Tematik
Dinas Peternakan	• Pengadaan 10 box ayam daging yang diberikan ke 10 rumah tangga peternak mandiri • Penyediaan telur ayam ras dari UPTD Dinas Peternakan • Himbauan pada kelompok peternak untuk menjual ayam dibawah harga pasar untuk mengendalikan harga pasar/inflasi	• Keterbatasan anggaran • Usaha masyarakat yang sudah diberi bantuan tidak berlanjut karena modal habis	• Pengadaan ayam daging produktif • Penyediaan telur ayam ras dari UPTD Dinas Peternakan • Himbauan pada kelompok peternak untuk menjual ayam dibawah harga pasar untuk mengendalikan harga pasar/inflasi
BPKAD	• Survei perkembangan harga di dalam dan diluar sumba tengah (dilakukan dalam rangka menyusun Standar Biaya Pemerintah Daerah)	• Struktur anggaran sumba tengah banyak yang bertumpu pada pendapatan pusat. nilai PAD sumba tengah kecil.	• Edaran untuk belanja di wilayah sumba tengah
Bagian Perekonomian	• rapat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) • operasi pasar murah (kerjasama dgn Bulog) • sidak pasar dan distributor (bersama Dinas KopUMKMPerindag) • bantuan operasional (biaya transport) dalam operasi	• Intervensi fiskal dipengaruhi juga oleh kemampuan anggaran pemerintah daerah	• Rapat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) • Pembentukan indeks inflasi daerah Kabupaten Sumba Tengah • Operasi pasar murah (Kerjasama dengan BUMN)

OPD	Program	Masalah	Rencana Program RB Tematik
	pasar (dari Bulog ke sumba tengah)		
Dinas Perikanan	• Bantuan pakan ikan • Bantuan benih ikan gratis	• keterbatasan anggaran • Pemberian bantuan pada kelompok tidak berkelanjutan (masyarakat kehabisan modal) • pemberian bantuan hanya aksi kegiatan saja • tidak ada TPI/tempat penampungan sementara di pinggir pantai	• Poll transaksi jual beli ikan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	• Pengembangan komoditi holtikultura di beberapa kelompok tani (cabe, bawang merah, sayur-sayuran) • Optimalisasi pengembangan bantaran sungai (padi, jagung, holtikultura)	• Bawang merah tidak memenuhi kebutuhan	• Edaran untuk fokus penanaman bawang merah (intensifikasi) • Pengembangan holtikultura dan optimalisasi lahan bantaran sungai

Deskripsi Rencana Program RB Tematik Pengendalian Inflasi :

1. Bapelitbangda
 - a. Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan optimalisasi produksi bahan pokok lokal: melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan produksi bahan pokok lokal bisa memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah
2. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Pemantauan harga barang dan stok barang kebutuhan pokok (laporan perhari): pemantauan untuk melihat pergerakan harga barang dan stok kebutuhan barang pokok di pasar. Tujuannya agar ada update riil terkait harga barang dan stok di pasar sehingga
 - b. Program pengembangan fasilitas pasar (pasar dan parkir): peningkatan fasilitas pasar dan parkir agar menarik Masyarakat untuk berkunjung ke pasar Sumba Tengah
 - c. Pemberian surat himbauan untuk tidak menimbun bahan makanan dan edaran untuk belanja dipasar: surat edaran yang diterbitkan sebagai bagian pencegahan agar pedagang tidak menimbun bahan makanan Ketika permintaan sedang tinggi. Selain itu, edaran untuk belanja ke pasar di Suba Tengah agar perputaran ekonomi masih berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah
 - d. Pengembangan kompetensi pegawai untuk penera ulang SPBU : karena terbatasnya pegawai yang memiliki keahlian dalam tera ulang SPBU maka perlu diberikan pengembangan kompetensi tera ulang pada pegawai yang ada saat ini.
 - e. Memprioritasnya pengadaan tera/ tera ulang alat ukur, takar, timbang dan peralatannya (UTTP) pada bidang metrology agar memberikan kepastian kepada konsumen dan kevalidan data konsumsi Masyarakat.
3. Dinas Peternakan
 - a. Pengadaan ayam daging produktif: pengadaan ayam pedaging produktif yang bertujuan untuk dikembangkan dan hasilnya bisa dijual dipasar Sumba Tengah. Pengadaan ayam pegading ini nantinya akan disalurkan kepada rumah tangga miskin tapi bukan untuk konsumsi melainkan sebagai bantuan produktif.
 - b. Penyediaan telur ayam ras dari UPTD Dinas Peternakan : kegiatan penyediaan telur ayam ras yang dihasilkan dari ayam petelur yang dipelihara oleh UPTD Dinas Peternakan untuk mencukupi stok kebutuhan telur di Kabupaten Sumba Tengah
 - c. Himbauan pada kelompok peternak untuk menjual ayam dibawah harga pasar: Tindak lanjut dari pemberian bantuan ayam daging produktif, memberikan arahan untu penjualan dibawah harga pasar. Hal ini dikarenakan, ada bantuan operasional yang diberikan pemerintah pada rumah tangga miskin tersebut seperti pakan dan vitamin.
4. BPKAD

Edaran untuk berbelanja di wilayah Sumba Tengah: Edaran yang disampaikan khusus untuk seluruh pegawai pemerintah di Kabupaten Sumba Tengah agar belanja konsumsi dilakukan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah

5. Bagian Perekonomian

- a. Rapat tim pengendalian inflasi daerah (TPID): kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bagian untuk mengantisipasi inflasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Rapat ini dilakukan sebagai bagian dari Bagian Ekonomi yang bertindak sebagai PIC pengendalian inflasi daerah
- b. Pembentukan indeks inflasi daerah Kabupaten Sumba Tengah: angka inflasi daerah saat ini masih mengacu pada waingapu, sehingga perlu disiapkan rencana dan kegiatan untuk membentuk indeks inflasi daerah secara mandiri di wilayah Sumba Tengah
- c. Operasi pasar murah (Kerjasama dengan BUMN): operasi pasar dengan tujuan menekan harga barang. Biasanya operasi pasar dilakukan dengan Kerjasama dengan Bulog. Namun, hal tersebut perlu diperluas dengan melakukan Kerjasama dengan BUMN yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumba Tengah

6. Dinas Perikanan

Poll Jual Beli Ikan: tempat transaksi jual beli ikan skala menengah agar transaksi jual beli ikan dapat terjadi di wilayah Kabupaten Sumba Tengah

7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Edaran untuk fokus penanaman bawang merah (intensifikasi): persediaan dan permintaan bawang merah yang minus menjadi dasar untuk pemberian edaran penanaman fokus pada bawang merah agar kestabilan harga bawang merah dapat terjaga
- b. Pengembangan holtikultura dan optimalisasi lahan bantaran Sungai: penambahan ruang tanam dengan memanfaatkan bantaran Sungai. Namun, hal ini perlu koordinasi dengan dinas terkait mengenai berbagai aspek kebijakan.

E. Tema Peningkatan Pemakaian Produk Dalam Negeri

Penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Inpres tersebut disampaikan bahwa penggunaan produk dalam negeri ini masuk dalam reformasi birokrasi. Selain itu juga pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/ jasa pemerintah perlu berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dari total 82/K/L yang dievaluasi terdapat 50 K/L dengan penggunaan PDN di atas 40 persen. Sebanyak 32 dari 34 provinsi mengimplementasikan penggunaan PDN di atas 40 persen. Sementara dari total 463 kabupaten/kota terdapat 423 kab/kota dengan penggunaan PDN di atas 40 persen (Menteri PAN RB, 2023).

Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri tentu menjadi tanggung jawab pemerintah di semua lini. Pada level pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya

penggunaan produk dalam negeri. Di Kabupaten Sumba Tengah, target yang telah ditetapkan dalam RPD berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Target Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline (2021)	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1.	Jumlah kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kegiatan)	0	1	1	1
2.	Cakupan produk unggulan lokal yang mendapat pengakuan melalui Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	60%	63%	66,15%	69,46%

Sumber: Dokumen RPD Sumba Tengah

Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri belum dilakukan. Selain itu, informasi dari OPD bahwa sebenarnya pada proses pengadaan barang/ jasa sudah melebihi 40% menggunakan produk dalam negeri. Hanya saja, dalam setiap input dalam aplikasi tidak terdeteksi persentase PDNnya. Selain itu, tidak tercantum pula target APBD setiap tahun untuk penggunaan produk dalam negeri. Indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah belum menjadi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penerima manfaat dari anggaran pemerintah adalah pengusaha atau masyarakat lokal.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh OPD terkait untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri bahkan produk local yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Bagian Pengadaan Barang/ Jasa: Tahun 2019 Tim P3DN pernah ada dibentuk melalui Keputusan Bupati. Timnya hanya sebatas pengadaan barang dan jasa saja. P3DN melakukan survey dan sosialisasi ke rumah makan, toko ATK, dan toko lainnya tahun 2019. Tetapi belum sampai pada pendaftaran di e-katalog. Saat ini tidak ada lagi tim P3DN karena keterbatasan anggaran. di aplikasi SIRUP mengisi penggunaan produk dalam negeri. Tidak ada yang spesifik berapa jumlah nilai PDN.
- Plt. Kepala Daerah: Saat ini di Sumba Tengah wajib menggunakan pangan lokal untuk kebutuhan makan-minum pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda dan menggunakan APBD. Namun terkait ini, tidak ada surat edaran dari Pj. Bupati, sifatnya instruksi langsung.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk semua bahan bangunan pemerintah, wajib menggunakan batu potong yang dihasilkan oleh Sumba Tengah daripada batu cetak. Untuk untuk trotoar juga menggunakan batu potong. Rumah

Layak Huni menggunakan sumber daya lokal untuk pembangunannya. Sehingga masyarakat lokal mendapatkan manfaat. Selain batu potong, juga bahan kerikil, kayu dan atap menggunakan gedek.

- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Unggulan Kabupaten, termasuk batu potong. Selain itu memberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha di Kabupaten Sumba Tengah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ aktivitas program penggunaan dalam negeri adalah:

- Keterbatasan jumlah SDM. Survey dan pendataan UMKM yang bisa masuk dalam e-katalog membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Bagian PBJ Kabupaten Sumba Tengah belum memiliki SDM yang mencukupi untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Saat ini yang masuk dalam e-katalog baru sebatas produk kesehatan termasuk obat-obatan maupun alat kesehatan. Survei pernah dilaksanakan tahun 2019 untuk produk makanan, minuman dan mebel namun belum dilaksanakan tindak lanjut pasca survei. Selang lima tahun sejak tahun 2019, survei lanjutan dan tindak lanjut pendampingan pendaftaran di e-katalog belum dilakukan.
- Kemampuan IT tim survey dan pelaku usaha. Untuk mendaftarkan produk-produk lokal dalam e-katalog membutuhkan kemampuan IT karena proses pendaftaran sudah dilakukan secara elektronik. Selain jumlah SDM yang kurang, kemampuan IT dari pihak yang berkepentingan juga masih minim. Tentu ini mempersulit dan memperlambat proses pendaftaran. Pelaku usaha merasa kesulitan karena proses pendaftaran yang dilakukan secara elektronik. Apalagi tidak dilakukan pendampingan oleh pihak pemda secara memadai kepada pelaku usaha.
- Kurangnya dokumentasi peraturan yang mendukung penggunaan produk dalam negeri/ produk lokal. Dorongan untuk OPD menggunakan produk dalam negeri/ produk lokal seharusnya didokumentasikan dalam bentuk satu peraturan tertulis. Begitu pula seharusnya kebijakan menggunakan pangan lokal untuk kebutuhan makan minum pada acara pemerintah daerah. Tetapi realitanya, penggunaan produk lokal/ dalam negeri hanya imbauan yang tidak ada peraturan tertulis/ operasionalisasi di tingkat pemda untuk penggunaan produk dalam negeri.
- Untuk barang/ jasa yang diperlukan secara rutin tidak dibuat kontrak dengan penyedia tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan masih minimnya produk lokal yang masuk dalam e-katalog. Contoh barang/ jasa yang diperlukan secara rutin seperti alat tulis kantor (ATK), makanan dan minuman, percetakan. Setiap OPD secara sporadis mencari penyedia tidak ada kontrak khusus dengan penyedia tertentu.

Tabel 19. Matrik Analisis Permasalahan dan Eksplorasi Usulan Program RB Tematik Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri

OPD			Program/Kegiatan saat ini	Masalah	Rencana RB Tematik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	• Minimnya produk local Kabupaten Sumba Tengah yang masuk dalam e-katalog	• Fasilitasi pemberdayaan pengusaha local untuk memasukkan produknya dalam e-katalog
			Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	• Belum terselenggara secara rutin promosi penggunaan produk dalam negeri	• Promosi penggunaan produk yang ada dalam e-katalog local Sumba Tengah.
Dinas Pekerjaan Umum			Pembangunan infrastruktur secara keseluruhan di Kabupaten Sumba Tengah	• Tidak tercatat persentase penggunaan PDN dalam Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumba Tengah	• Melakukan pelatihan untuk menghitung persentase PDN dalam pengadaan barang/ jasa yang digunakan untuk Pembangunan infrastruktur.
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa			Pembentukan tim P3DN dan sosialisasi pendaftaran ke e-katalog lokal	• Tim P3DN tidak berlanjut sejak tahun 2019	• Mendorong pembentukan kembali tim P3DN • Bersama tim dari dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi ke UMKM

Deskripsi Rencana Program RB Tematik Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri :

- Dalam hal menjamin produk-produk hasil usaha UKM yang ada di Kabupaten Sumba Tengah dapat dipasarkan dengan baik adalah usaha tersebut mendaftarkan usahanya dalam e-katalog. Dengan E-Katalog, pasar lebih luas dan pemerintah pun bisa memilih untuk membeli barang/ jasa melalui etalase yang ada di e-katalog. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, UKM, dan perdagangan dan Perindustrian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan hingga membantu proses pemasaran produk melalui e-katalog. Fasilitasi dan pembinaan ini dapat bekerjasama dengan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa untuk mempermudah proses input ke dalam katalog.
- Dinas PU selaku OPD yang banyak menggunakan anggaran untuk proses pengadaan barang/ jasa sangat penting memastikan bahwa persentase penggunaan anggaran untuk pengadaan barang/ jasa lebih dari 40% adalah menggunakan produk dalam negeri. Sehingga penginputan berapa pada SIPD untuk memastikan penggunaan PDN lebih dari 40% sangat krusial. Pelatihan untuk menginput persentase 40% di SIPD perlu dilakukan.
- Bagian barang/ jasa bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan kolaborasi dalam sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dan UMKM local. Selain itu perlu memastikan business matching antara UKPBJ, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia). Hal ini dapat terealisasi maksimal apabila tim P3DN Kembali berfungsi dengan semestinya.
- Kepala daerah juga sebisa mungkin mendorong proses pengadaan barang/ jasa melalui e-katalog local baik untuk penggunaan anggaran secara rutin maupun anggaran program. Selain itu, bagian hukum dan OPD terkait lainnya harus bekerja sama untuk membuat peraturan tertulis terkait imbauan penggunaan produk local di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Peraturan tertulis ini menjadi rujukan bagi OPD dan *evidence* bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berpihak pada penggunaan PDN maupun produk local.

BAB V

AGENDA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN SUMBA TENGAH 2024-2026

A. Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan pendekatan baru yang dilakukan untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih berdampak. Terdapat 5 tema yang telah ditetapkan dalam RB Tematik yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting), Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap kondisi capaian kinerja masing-masing tema, Kabupaten Sumba Tengah memutuskan untuk memilih semua tema untuk diangkat sebagai fokus RB Tematik tahun 2024-2026. Selanjutnya sebagai pedoman arah pelaksanaan RB Tematik Tahun 2024-2026 maka disusunlah sasaran, indikator, target dan koordinator tim untuk masing-masing tema sebagai berikut :

Tabel 20. Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2023)	2024	Target 2025	2026	Koordinator
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	31,78	30,51	28,51	26,51	Bapelitbangda
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi (rupiah)	NA	10,00	12,50	15,00	DT2PMPTSP
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi stunting (berdasarkan Indeks SSGi)	7,3	6,82	6,13	5,52	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi (%) * menggunakan ukuran inflasi Waingapu (Sumba Timur)	3,27	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	Bagian Perekonomian Setda
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat penggunaan produk dalam negeri	NA	63%	66,15%	69,46%	DiskopUMKperindag

B. Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026

Untuk mencapai target tersebut, maka perlu dilakukan berbagai program sebagaimana yang tercantum dalam roadmap berikut :

Tabel 21. Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Penanggulangan Kemiskinan	- Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah	- Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah - Sinkronisasi dan Pembaruan data kemiskinan Kab. Sumteng - Kajian Evaluasi ketepatan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan	- Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah - Sinkronisasi dan Pembaruan data kemiskinan Kab. Sumteng - Kajian Evaluasi ketepatan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan - Kolaborasi pengentasan kemiskinan dengan stakeholders (swasta, BUMN, masyarakat)	Bapelitbangda (Koordinator)
	- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Inovatif (BUPI) untuk keluarga miskin - BLT Anak Yatim - Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin berdasarkan data DTKS	- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Inovatif (BUPI) untuk keluarga miskin - BLT Anak Yatim - Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin berdasarkan data DTKS - Sosialisasi/kampanye budaya malu dianggap miskin - Kajian/Evaluasi efektivitas program bantuan sosial (PKH, BLT, dll)	- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Inovatif (BUPI) untuk keluarga miskin - BLT Anak Yatim - Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin berdasarkan data DTKS - Sosialisasi/kampanye budaya malu dianggap miskin - Kajian/Evaluasi efektivitas program bantuan sosial (PKH, BLT, dll)	Dinas Sosial dan PPA
	Pemberian bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	Pemberian bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	Pemberian bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	Dinas Kesehatan

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		• Verifikasi dan validasi data Masyarakat miskin penerima bantuan JKN KIS/Jamkesda • Kajian/evaluasi efektivitas JKN-KIS/Jamkesda untuk Masyarakat Miskin	• Verifikasi dan validasi data Masyarakat miskin penerima bantuan JKN KIS/Jamkesda • Kajian/evaluasi efektivitas JKN-KIS/Jamkesda untuk Masyarakat Miskin	
	• Budidaya tanaman hortikultura	• Budidaya tanaman hortikultura • Penyuluhan terkait teknik-teknik pertanian di musim kemarau • Bantuan penyediaan alat pengolahan pascapanen pada kelompok tani • Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal	• Budidaya tanaman hortikultura • Penyuluhan terkait teknik-teknik pertanian di musim kemarau • Bantuan penyediaan alat pengolahan pascapanen pada kelompok tani • Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal • Festival pangan lokal	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	• Pengadaan Ayam Pedaging	• Bantuan ternak (Kambing, Babi, Sapi, Kerbau dan Kuda) kepada kelompok peternak • Bantuan penyediaan alat-alat pengolahan produk peternakan • Pelatihan pembuatan produk olahan hasil ternak • Kerjasama pemasaran	• Bantuan ternak (Kambing, Babi, Sapi, Kerbau dan Kuda) kepada kelompok peternak • Bantuan penyediaan alat-alat pengolahan produk peternakan • Pelatihan pembuatan produk olahan hasil ternak • Kerjasama pemasaran	Dinas Peternakan
	• Program pengelolaan perikanan tangkap • Program pengelolaan perikanan budidaya • Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	• Program pengelolaan perikanan tangkap • Program pengelolaan perikanan budidaya • Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	• Program pengelolaan perikanan tangkap • Program pengelolaan perikanan budidaya • Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
	• Pelatihan kewirausahaan	• Pelatihan kewirausahaan • Pelatihan pemasaran online/e-commerce • Pusat konsultasi dan pendampingan kewirausahaan • Kompetisi Kewirausahaan • Penguatan dan pendirian koperasi unit desa (KUD)	• Pelatihan kewirausahaan • Pelatihan pemasaran online/e-commerce • Pusat konsultasi dan pendampingan kewirausahaan • Kompetisi Kewirausahaan • Penciptaan sentra pemasaran terpadu • Bazaar UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Penguatan dan pendirian koperasi unit desa (KUD)	
	- Pengembangan Lokasi Pariwisata - Program pengembangan kebudayaan	- Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata - Pengembangan Produk dan Budaya Unggulan khas Sumba Tengah - Revitalisasi Nilai Budaya/Adat	- Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata - Pengembangan Produk dan Budaya Unggulan khas Sumba Tengah - Revitalisasi Nilai Budaya/Adat - Festival Wisata Sumba Tengah - Beasiswa Bidang Pariwisata - Promosi Wisata Sumba Tengah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	- Pembangunan Rumah layak huni - Pembangunan Sanitasi - Pembangunan sarana air bersih	- Pembangunan Rumah layak huni - Pembangunan Sanitasi - Pembangunan sarana air bersih - Peningkatan sarana infrastruktur ke lokasi objek wisata - Kajian/Evaluasi efektivitas program pembangunan rumah layak huni dan pengaruhnya terhadap masyarakat miskin	- Pembangunan Rumah layak huni - Pembangunan Sanitasi - Pembangunan sarana air bersih - Peningkatan sarana infrastruktur ke lokasi objek wisata - Kajian/Evaluasi efektivitas program pembangunan rumah layak huni dan pengaruhnya terhadap masyarakat miskin - Pembangunan embung dan penampungan air	Dinas PUPR
	Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1 Desa 1 BUMDes - Penyelarasan program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten - Monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan di desa	1 Desa 1 BUMDes - Penyelarasan program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten - Monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan di desa	Dinas PMD
	- Program Pengelolaan pendidikan - Program pendidik dan tenaga kependidikan	- Wajib belajar 12 Tahun - Sekolah gratis untuk SD dan SMP - Sosialisasi Layanan Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) - Peningkatan kualitas guru - Rehabilitasi sarana prasarana sekolah - Pendampingan untuk mendapatkan akses beasiswa bagi siswa SMA/Mahasiswa	- Wajib belajar 12 Tahun - Sekolah gratis untuk SD dan SMP - Sosialisasi Layanan Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) - Peningkatan kualitas guru - Rehabilitasi sarana prasarana sekolah - Pendampingan untuk mendapatkan akses beasiswa bagi siswa SMA/Mahasiswa	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			- Bantuan biaya pendukung pendidikan bagi siswa berprestasi (SD dan SMP) - Bus Sekolah/Mobil Jemputan	
	Penerbitan/pembaruan KK, akte kelahiran dan KTP bagi warga miskin	Penerbitan/pembaruan KK, akte kelahiran dan KTP bagi warga miskin	Penerbitan/pembaruan KK, akte kelahiran dan KTP bagi warga miskin	Dinas Dukcapil
	- Pelatihan vokasi/keterampilan berbasis kompetensi - Program penempatan tenaga kerja - Promosi penanaman modal	- Pelatihan vokasi/keterampilan - Bursa Kerja - Promosi penanaman modal	- Pelatihan vokasi/keterampilan - Bursa Kerja - Promosi penanaman modal	Dinas Trans, Naker, PM dan PTSP
	- Pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan - Pemenuhan perlengkapan jalan - Pelayanan Pelabuhan feri	- Penyelesaian Pembangunan terminal - Pemenuhan perlengkapan jalan - Pelayanan Pelabuhan feri	- Penyelesaian Pembangunan terminal - Pemenuhan perlengkapan jalan - Pelayanan Pelabuhan feri	Dinas Perhubungan
	Bantuan sosial beasiswa pendidikan (Program beasiswa abadi)	Bantuan sosial beasiswa pendidikan	Bantuan sosial beasiswa pendidikan	Bagian Kesra
Peningkatan Investasi	- Peningkatan layanan perizinan menggunakan OSS - Reviu SOP perizinan - Penggunaan OSS untuk monitoring - Layanan informasi investasi layanan pengaduan	- Pembuatan paket invetasi - Menghadiri/ menginisiasai investment forum - layanan informasi investasi - layanan pengaduan - Peningkatan layanan perizinan menggunakan OSS - Penggunaan OSS untuk monitoring	- Penggunaan OSS untuk monitoring - Berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menjamin keamanan berinvestasi. - layanan informasi investasi - layanan pengaduan	DT2PMPTSP (Koordinator)
	Koordinasi kerja sama terkait budidaya bahan baku dengan OPD terkait (contoh: Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan)	- penyediaan lahan untuk budidaya bahan baku produksi bahan baku dalam skala yang lebih besar - pelatihan manajerial bagi pelaku UMKM produk unggulan Sumba Tengah	Ekspansi pasar Komunikasi dengan investor potensial	Diskop UMK Perindustrian dan Perdagangan
	- Reviu rencana tata ruang Kab. Sumba Tengah - Identifikasi kebutuhan infrastruktur di wilayah potensial	Pembangunan infrastruktur di wilayah potensial	Pembangunan infrastruktur di wilayah potensial	Dinas PU
	Monitoring pelaksanaan masterplan pengembangan investasi	Monitoring pelaksanaan masterplan pengembangan investasi	Monitoring pelaksanaan masterplan pengembangan investasi	Bapelitbangda
	Identifikasi dan eksplorasi atraksi dan variasi wisata	Penyusunan analisis cost and benefit atraksi dan diversifikasi wisata	Pelaksanaan atraksi tambahan dan diversifikasi wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (penurunan Stunting)	• Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ PIK-R) • Bina Keluarga Balita ber-KB	• Menjadi PIC penurunan angka stunting kabupaten • Melakukan pembagian tugas ke seluruh OPD sesuai tusi masing-masing • Melakukan sinkronisasi dan updating data stunting • Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ PIK-R) • Bina Keluarga Balita ber-KB	• Menjadi PIC penurunan angka stunting kabupaten • Melakukan pembagian tugas ke seluruh OPD sesuai tusi masing-masing • Melakukan sinkronisasi dan updating data stunting • Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ PIK-R) • Bina Keluarga Balita ber-KB • Bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk membangun satu data stunting	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Koordinator)
	• Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan penanganan stunting lintas OPD (TPPS) • koordinasi berkala terkait progress perkembangan penanganan stunting ke Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	• Koordinasi dan sinkronisasi data stunting serta eksekusi lapangan • Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan penanganan stunting lintas OPD (TPPS) • koordinasi berkala terkait progress perkembangan penanganan stunting ke Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	• Koordinasi dan sinkronisasi data stunting serta eksekusi lapangan • Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan penanganan stunting lintas OPD (TPPS) • koordinasi berkala terkait progress perkembangan penanganan stunting ke Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Bappelitbangda
	• Pemberian suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil • Edukasi tentang pola makan sehat • Pemeriksaan kesehatan ibu hamil • Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) dan untuk balita gizi kurang • Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita tiap bulan melalui Posyandu dan faskes lainnya • Edukasi ASI eksklusif • Screening anemia • Screening tetanus toksoid	• Pemberian suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil • Edukasi tentang pola makan sehat • Pemeriksaan kesehatan ibu hamil • Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) dan untuk balita gizi kurang • Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita tiap bulan melalui Posyandu dan faskes lainnya • Edukasi ASI eksklusif • Screening anemia • Screening tetanus toksoid	• Pemberian suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil • Edukasi tentang pola makan sehat • Pemeriksaan kesehatan ibu hamil • Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) dan untuk balita gizi kurang • Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita tiap bulan melalui Posyandu dan faskes lainnya • Edukasi ASI eksklusif • Screening anemia • Screening tetanus toksoid	Dinas Kesehatan

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	- Pendampingan balita gizi kurang - Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk balita - Bantuan iuran (PBI) Jaminan kesehatan pada Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu	- Pendampingan balita gizi kurang - Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk balita - Bantuan iuran (PBI) Jaminan kesehatan pada Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu - Pemeriksaan kesehatan pra-nikah calon pengantin - Edukasi reproduksi dan gizi pada calon pengantin - Kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan - Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Pendampingan balita gizi kurang - Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk balita - Bantuan iuran (PBI) Jaminan kesehatan pada Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu - Pemeriksaan kesehatan pra-nikah calon pengantin - Edukasi reproduksi dan gizi pada calon pengantin - Kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan - Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
	- Bantuan sosial Program Keluarga Harapan/ PKH - Bantuan pangan non tunai berupa beras kepada keluarga miskin dan rentan	- Bantuan sosial Program Keluarga Harapan/ PKH - Bantuan pangan non tunai berupa beras kepada keluarga miskin dan rentan	- Bantuan sosial Program Keluarga Harapan/ PKH - Bantuan pangan non tunai berupa beras kepada keluarga miskin dan rentan	Dinas Sosial dan PPA
	- Pemberian bantuan ternak - Penyediaan telur segar	- Pemberian bantuan ternak produktif - Pemberian bantuan ternak konsumtif untuk keluarga terindikasi stunting - Pemberian bantuan telur untuk anak sekolah - sosialisasi pola makan sehat dan bergizi	- Pemberian bantuan ternak produktif - Pemberian bantuan ternak konsumtif untuk keluarga terindikasi stunting - Pemberian bantuan telur untuk anak sekolah - sosialisasi pola makan sehat dan bergizi - Penyediaan fasilitas rumah potong hewan	Dinas Peternakan
	- Bantuan benih ikan pada kelompok budidaya - Bantuan kolam bioflok	- Sosialisasi gemar makan ikan untuk anak-anak - Kolaborasi dengan dinas Pendidikan untuk pemberian makan siang gratis lauk ikan - Bantuan benih ikan pada kelompok budidaya - Bantuan kolam bioflok	- Sosialisasi gemar makan ikan untuk anak-anak - Kolaborasi dengan dinas Pendidikan untuk pemberian makan siang gratis lauk ikan - Bantuan benih ikan pada kelompok budidaya	Dinas Perikanan

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Budidaya tanaman hortikultura	- Budidaya tanaman hortikultura - Gerakan menanam buah di pekarangan - Kampanye gemar makan sayur - Menghidupkan kembali kebijakan “3 gerakan moral” (Gerakan kembali ke kebuh, Gerakan hidup hemat, dan Gerakan desa aman)	- Budidaya tanaman hortikultura - Gerakan menanam buah di pekarangan - Kampanye gemar makan sayur - Menghidupkan kembali kebijakan “3 gerakan moral” (Gerakan kembali ke kebuh, Gerakan hidup hemat, dan Gerakan desa aman)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	- Penyediaan sarana air bersih pedesaan - Penyediaan akses sanitasi	- Penyediaan sarana air bersih pedesaan - Penyediaan akses sanitasi	- Penyediaan sarana air bersih pedesaan - Penyediaan akses sanitasi	Dinas PUPR
	Peningkatan kompetensi pegawai untuk sistem informasi/digitalisasi pemerintahan	- Peningkatan kompetensi pegawai untuk sistem informasi/digitalisasi pemerintahan - Membangun sistem data sederhana berbasis elektronik	- Peningkatan kompetensi pegawai untuk sistem informasi/digitalisasi pemerintahan - Membangun platform/dashboard data dan informasi stunting (satu data stunting)	Dinas Kominfo
	Pelatihan Pengasuhan Penanganan Stunting bagi guru PAUD	- Pelatihan Pengasuhan Penanganan Stunting bagi guru PAUD - Pendataan anak/balita stunting atau beresiko di PAUD	- Pelatihan Pengasuhan Penanganan Stunting bagi guru PAUD - Pendataan anak/balita stunting atau beresiko di PAUD Pengembangan pendidikan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) pada lembaga PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (karang taruna, LPM, PKK, Posyandu)	- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (karang taruna, LPM, PKK, Posyandu) - Pendataan jumlah anak stunting per desa	- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (karang taruna, LPM, PKK, Posyandu) - Pendataan jumlah anak stunting per desa - Pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Desa	Dinas PMD
Pengendalian Inflasi	- Rapat teknis pengendalian inflasi daerah - Pembentukan indeks inflasi daerah Kabupaten Sumba Tengah - Operasi pasar murah (Kerjasama dengan BUMN)	- Rapat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) - Pemantauan Indeks Inflasi daerah	- Rapat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) - Pemantauan Indeks Inflasi daerah	Bagian Ekonomi (Koordinator)

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan optimalisasi produksi bahan pokok lokal	Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan optimalisasi produksi bahan pokok lokal	Koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan optimalisasi produksi bahan pokok lokal	Bappelitbangda
	- Pemantauan harga barang dan stok barang kebutuhan pokok (laporan perhari) - Program pengembangan fasilitas pasar (pasar dan parkir) - Penera ulang SPBU - Pemberian surat himbauan untuk tidak menimbun bahan makanan dan edaran untuk belanja dipasar	- Pemantauan harga barang dan stok barang kebutuhan pokok (laporan perhari) - Program pengembangan fasilitas pasar (pasar dan parkir) - Pemberian surat himbauan untuk tidak menimbun bahan makanan dan edaran untuk belanja dipasar - Pengembangan kompetensi pegawai untuk penera ulang SPBU - Penera ulang	- Pemantauan harga barang dan stok barang kebutuhan pokok (laporan perhari) - Program pengembangan fasilitas pasar (pasar dan parkir) - Pemberian surat himbauan untuk tidak menimbun bahan makanan dan edaran untuk belanja dipasar - Penera ulang SPBU - pengadaan tera/ tera ulang alat ukur, takar, timbang dan peralatannya (UTTP)	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
	- Pengadaan ayam daging produktif - Penyediaan telur ayam ras dari UPTD Dinas Peternakan - Pemberian arahan untuk penjualan dibawah harga pasar	- Pengadaan ayam daging produktif - Penyediaan telur ayam ras dari UPTD Dinas Peternakan	- Pengadaan ayam daging produktif - Penyediaan telur ayam ras dari UPTD Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
	Edaran untuk belanja di wilayah sumba tengah	Edaran untuk belanja di wilayah sumba tengah	Edaran untuk belanja di wilayah sumba tengah	BPKAD
	Poli transaksi jual beli ikan			Dinas Perikanan
	- Edaran untuk fokus penanaman bawang merah (intensifikasi) - Pengembangan holtikultura dan optimalisasi lahan bantaran sungai	- Edaran untuk fokus penanaman bawang merah (intensifikasi) - Pengembangan holtikultura dan optimalisasi lahan bantaran sungai	Pengembangan holtikultura dan optimalisasi lahan bantaran sungai	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	- sosialisasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM - Fasilitasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM	- sosialisasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM - Fasilitasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM - Promosi penggunaan produk yang ada dalam e-katalog local Sumba Tengah.	- sosialisasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM - Fasilitasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM - Promosi penggunaan produk yang ada dalam e-katalog local Sumba Tengah.	DiskopUMKperindag (Koordinator)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- sosialisasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM - Fasilitasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM	- sosialisasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM - Fasilitasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM	- sosialisasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM - Fasilitasi pendaftaran e-katalog local ke UMKM	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Tema	Program RB Tematik Sumba Tengah			Instansi Kunci
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		- Promosi penggunaan produk yang ada dalam e-katalog local Sumba Tengah. - Mendorong pembentukan Kembali tim P3DN	Promosi penggunaan produk yang ada dalam e-katalog local Sumba Tengah.	
	pelatihan untuk menghitung persentase PDN dalam pengadaan barang/ jasa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur	Penghitungan persentase PDN dalam pengadaan barang/ jasa	Penghitungan persentase PDN dalam pengadaan barang/ jasa	Dinas PUPR

BAB VI

MANAJEMEN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik berjalan dengan lancar, efektif dan efisien maka perlu ditetapkan pola manajemen/pengelolaannya. Dalam pola manajemen ini ditetapkan susunan tim RB Tematik yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana serta tugasnya masing-masing. Pengaturan ini dibutuhkan untuk memastikan terjalannya kolaborasi/sinergi lintas OPD yang sama-sama terlibat dalam tema yang sama.

A. Susunan Tim Reformasi Birokrasi Tematik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bersama, tidak dibebankan kepada hanya salah satu unit kerja saja. Hal yang perlu diperhatikan adalah pembagian peran dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi tumpang tindih dan adanya kejelasan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Masing-masing unit kerja di setiap tema bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kegiatan-kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi berjalan dengan efektif, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Tabel 22. Susunan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah

No	Kedudukan dalam Tim		Kedudukan dalam Jabatan
1	Tim Pengarah		
	Ketua	:	Bupati Sumba Tengah
	Sekretaris	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah
2	Ketua Tim Pelaksana	:	Kepala Bappelitbangda
3	Tim Pelaksana Tema Pengentasan Kemiskinan		
	Koordinator	:	Kepala Bappelitbangda
	Anggota	:	1. Kepala Dinas Sosial dan PPA 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4. Kepala Dinas Perikanan 5. Kepala Dinas Peternakan 6. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8. Kepala Dinas PUPR 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, dan PTSP 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Kepala Dinas Perhubungan

No	Kedudukan dalam Tim		Kedudukan dalam Jabatan
			14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 15. Personil dari Bappelitbangda
4	Tim Pelaksana Tema Peningkatan Investasi		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, dan PTSP
	Anggota	:	1. Kepala Dinas PUPR 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4. Kepala Bappelitbangda 5. Personil dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, dan PTSP
5	Tim Pelaksana Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Anggota	:	1. Kepala Bappelitbangda 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Sosial dan PPA 4. Kepala Dinas Peternakan 5. Kepala Dinas Perikanan 6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7. Kepala Dinas PUPR 8. Kepala Dinas Kominfo 9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Personil dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
6	Tim Pelaksana Tema Pengendalian Inflasi		
	Koordinator	:	Kepala Bagian Perekonomian
	Anggota	:	1. Kepala Bappelitbangda 2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 3. Kepala Dinas Perikanan 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5. Kepala Dinas Peternakan 6. Kepala BPKAD 7. Personil dari Bagian Perekonomian
7	Tim Pelaksana Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Anggota	:	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, dan PTSP 2. Kepala Dinas PUPR 3. Kepala Bagian Barang dan Jasa 4. Personil dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

B. Tugas Tim Reformasi Birokrasi Tematik

a. Tugas Tim Pengarah dalam RB tematik adalah :

1. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan RB tematik
2. Menetapkan target yang harus dicapai dalam RB tematik baik hasil, waktu maupun anggaran

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RB Tematik

b. Tugas Ketua Tim Pelaksana dalam RB tematik adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan tim pelaksana menyusun dokumen roadmap RB Tematik
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi semua tema RB tematik
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan semua tema RB Tematik
4. Melaporkan progres dan capaian pelaksanaan RB Tematik pada Tim Pengarah

c. Tugas Koordinator dalam RB tematik adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan anggota tim menyusun rencana aksi RB tematik sesuai dengan tema masing-masing
2. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan: Memastikan pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik yang telah direncanakan (masing-masing tema) berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup penyelarasan kebijakan, perencanaan, dan implementasi lintas unit atau sektor terkait.
3. Memantau dan Mengevaluasi Progres: Mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, mengidentifikasi hambatan, memberikan solusi, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian target yang telah ditentukan.
4. Melaporkan Progres RB tematik: koordinator masing-masing tema memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil RB tematik kepada Ketua Tim Pelaksana

d. Tugas anggota dalam proses RB tematik ini adalah:

1. Menyusun rencana aksi RB tematik bersama-sama koordinator tim
2. Melaksanakan tugas operasional berdasarkan arahan rencana aksi sesuai dengan tema reformasi birokrasi yang ditetapkan.
3. Mengimplementasikan kebijakan, program, dan rencana aksi di lingkup unit kerja masing-masing.
4. Menyusun dokumen laporan kemajuan, evaluasi, dan rekomendasi reformasi birokrasi tematik.

C. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dilaksanakan oleh masing-masing koordinator tim pelaksana terhadap progres kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan oleh internal tim masing-masing tema. Setelah itu, proses monitoring keseluruhan tema dilaksanakan oleh inspektur bersama jajaran inspektorat di Kabupaten Sumba Tengah. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan secara triwulan. Laporan monitoring disampaikan kepada sekretaris daerah. Pada awal triwulan III dilakukan pula evaluasi efektivitas rencana aksi untuk mencapai tujuan. Proses evaluasi ini dilakukan secara komprehensif dan holistic melibatkan seluruh tim, inspektorat, sekretaris daerah dan stakeholder terkait. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada evaluator nasional.

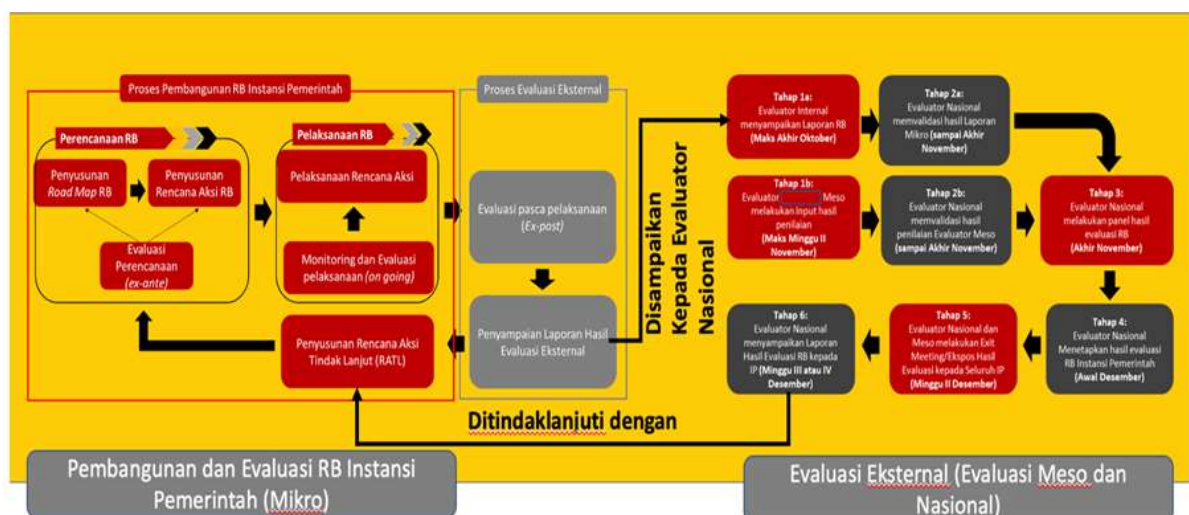
Beberapa mekanisme operasional yang dapat diterapkan pada saat pelaksanaan monev RB tematik adalah sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data secara berkala melalui instrumen seperti survei, laporan unit kerja, wawancara, atau data administratif untuk memantau kemajuan indikator.
- **Analisis Data:** Menganalisis data kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi capaian dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- **Feedback dan Rekomendasi:** Memberikan umpan balik berupa temuan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi.

Adapun evaluasi dilakukan dengan memperhatikan :

- Evaluasi Hasil (*Outcome Evaluation*): Mengukur dampak implementasi RB Tematik terhadap indikator yang telah ditentukan.
- Evaluasi Efisiensi (*Efficiency Evaluation*): Mengevaluasi efektivitas alokasi sumber daya, baik anggaran maupun personel, dalam mencapai tujuan.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian siklus perbaikan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hasil monev ke dalam perencanaan dan kebijakan tahun berikutnya untuk memastikan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Selain itu, mendorong budaya kerja berbasis kinerja melalui tindak lanjut rekomendasi monev secara konsisten. Berikut adalah keterkaitan proses evaluasi RB di tingkat internal atau instansi dengan Nasional.



Gambar 2. Keterkaitan Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi di Tingkat Internal dengan Nasional

Sumber: Kementerian PANRB, 2023

BAB VII

PENUTUP

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan fokus pada hasil (*outcome*) yang nyata dan berdampak langsung pada masyarakat. Melalui pendekatan berbasis tema, program ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai inisiatif lintas sektor untuk menyelesaikan masalah prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, percepatan investasi, digitalisasi pelayanan stunting, penurunan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri. Upaya ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pelaksanaannya.

Untuk mendukung efektivitas Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumba Tengah, diperlukan beberapa point yang harus diprioritaskan dalam proses pembangunan, diantaranya:

1. mekanisme koordinasi yang solid dan berlandaskan pada pola kerja kolaboratif, integrasi kebijakan yang komprehensif, serta pendekatan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap tahapan reformasi berjalan sesuai dengan rencana, serta memberikan ruang untuk perbaikan yang adaptif. Dengan pendekatan berbasis data dan pengambilan keputusan yang responsif, roadmap ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk transformasi birokrasi yang lebih profesional dan efisien.
2. Keberhasilan Reformasi Birokrasi Tematik juga bergantung pada penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang prima. Upaya ini harus didukung oleh peran aktif bukan hanya para anggota tim tetapi seluruh elemen birokrasi ada di Kabupaten Sumba Tengah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi menjadi elemen penting dalam mempercepat tercapainya target reformasi yang berdampak luas.
3. Pentingnya komitmen bersama untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan inovatif. Implementasi roadmap ini harus dijalankan dengan penuh integritas dan konsistensi agar mampu membawa perubahan signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Sumba Tengah. Dengan kerja sama dan sinergi yang erat, Reformasi Birokrasi Tematik dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Melalui beberapa agenda tersebut diharapkan akan mendukung percepatan pembangunan yang didukung dengan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks Kabupaten Sumba Tengah, Reformasi Birokrasi tematik diharapkan juga menjadi akselerator dalam peningkatan Pembangunan daerah.

Reformasi birokrasi tematik juga dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumba Tengah untuk: pertama, bisa saling sinergi kolaborasi dalam penyusunan program, kedua, mengurangi *silo mentality* dalam penyusunan program dan kegiatan daerah, ketiga, penyusunan program dan kegiatan berbasis data lapangan.

Roadmap reformasi birokrasi tematik ini menjadi landasan untuk seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan serta menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan periodik. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan beberapa agenda teknis di masing-masing perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. A. M. (2020). Party patronage and merit-based bureaucratic reform in Pakistan. *Commonwealth and Comparative Politics*, 58(2), 184–201.
<https://doi.org/10.1080/14662043.2020.1743161>
- Bolkvadze, K. (2017). Hitting the saturation point: unpacking the politics of bureaucratic reforms in hybrid regimes. *Democratization*, 24(4), 751–769.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1247808>
- BPS Kabupaten Sumba Tengah. (2024). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten_Kota, 2022-2024
- BPS Kabupaten Sumba Tengah. (2024). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten_Kota, 2022-2024
- BPS Provinsi NTT. (2023). Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki (Persen), 2021-2022
- BPS Provinsi NTT. (2024). Jumlah dan Persentase Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023
- BPS Provinsi NTT. (2024). Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023
- BPS Provinsi NTT. (2024). Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah), 2021-2023
- BPS. (2024). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten_Kota, 2022-2024
- BPS. (2024). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2022-2024
- Danar, O. R. (2024). Digital transformation of Indonesian administration and bureaucratic system. *International Journal of Electronic Governance*, 16(2), 152–171. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2024.140789>
- Dawar, N., & Frost, T. (1999). *Competing with Giants: Survival Strategies for Local Companies in Emerging Markets*.
- Furth, S. (2017). *Measuring Inflation Accurately*. <http://cta>.
- Haider, A., & Ghani, E. (2011). *Consequences of Political Instability, Governance and Bureaucratic Corruption on Inflation and Growth: The Case of Pakistan* (Vol. 50, Issue 4).
- <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-lakukan-persamaan-data-prevalensi-angka-stunting>

- <https://www.menpan.go.id/site/download/file/6886-6-laporan-hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023>
- Kemenpan. (2023, March 24). *Berkenalan dengan Konsep Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik*. Menpan.Go.Id.
- Kemenpan. (2024, October 15). *Menteri PANRB Sampaikan Capaian Reformasi Birokrasi 10 Tahun Terakhir*. Menpan.Go.Id.
- Kementerian PAN RB. (2023). Modul RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting.
- Keputusan Menteri PAN RB No.13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Daerah
- Luca, D. (2016). *LSE "Europe in Question" Discussion Paper Series Do bureaucracies enhance or constrain policy effectiveness? Evidence from Turkey's central management of public investment*.
- Maya Puspitasari, F., & Santoso, E. (2023). BUREAUCRATIC REFORM IN POVERTY ALLEVIATION. In *Society and Humanity* (Vol. 01, Issue 01).
- Nalien, E. M., & Ilham, T. (2019). The Effect of Bureaucratic Reforms Implementation for Optimizing of Governance in Indonesia (Focus on the Public Service Innovation in Local Government Institutions). *International Journal of Kybernology*, 3(2), 43–59. <https://doi.org/10.33701/ijok.v3i2.592>
- Nathalie, C. V., Gunawan, C., Febriane, F., Christiawan, H., Lukmarda, J. W., Azzahra, K., Alam, I. N., & Afny Catur Andryani, N. (2023). Digital Innovation Approach for Stunting Knowledge and Awareness Development in Society. *2023 5th International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS)*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/ICORIS60118.2023.10352224>
- Nishihara, A. H., Matsunaga, M., Nonaka, I., & Yokomichi, K. (2018). *Knowledge Creation in Public Administrations: Innovative Government in Southeast Asia and Japan* (1st ed.). palgrave macmillan.
- Nishihara, A. H., Matsunaga, M., Nonaka, I., & Yokomichi, K. (2018). *Knowledge Creation in Public Administrations: Innovative Government in Southeast Asia and Japan* (1st ed.). palgrave macmillan.
- Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. (2023) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026.
- Petridou, E., & Sparf, J. (2017). For safety's sake: The strategies of institutional entrepreneurs and bureaucratic reforms in Swedish crisis management, 2001–2009. *Policy and Society*, 36(4), 556–574. <https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1369677>

- Petridou, E., & Sparf, J. (2017). For safety's sake: The strategies of institutional entrepreneurs and bureaucratic reforms in Swedish crisis management, 2001–2009. *Policy and Society*, 36(4), 556–574.
<https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1369677>
- Prasojo, E. (2015, February 16). *Cutting back bureaucracy*. Wwww.Jakartapost.Com.
- Riza Singrapati, L., & Astuti, E. T. (2024). Determinants of stunting prevalence in Nusa Tenggara 2023. *Seminar Nasional Official Statistics 2024*, 183–192.
- Riza Singrapati, L., & Astuti, E. T. (2024). Determinants of stunting prevalence in Nusa Tenggara 2023. *Seminar Nasional Official Statistics 2024*, 183–192.
- Sacks, A., Rahman, E., Turkewitz, J., Buehler, M., & Saleh, I. (2014). *The Dynamics of Centralized Procurement Reform in a Decentralized State Evidence and Lessons from Indonesia*. <http://econ.worldbank.org>.
- Sekretariat Kabinet. (2022, December 5). *Wapres Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik dan Saksikan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik*. Setkab.Go.Id.
- Turner, M. (2013). Why is it so difficult to reform some asian bureaucracies? Building theory from cambodian evidence. *Public Administration and Development*, 33(4), 275–285. <https://doi.org/10.1002/pad.1655>
- Turner, M., Prasajo, E., & Sumarwono, R. (2022). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351.
<https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301>
- Turner, M., Prasajo, E., & Sumarwono, R. (2022a). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351.
<https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301>
- Turner, M., Prasajo, E., & Sumarwono, R. (2022b). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351.
<https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301>
- Wihantoro, Y., Lowe, A., Cooper, S., & Manochin, M. (2015). Bureaucratic reform in post-Asian Crisis Indonesia: The Directorate General of Tax. *Critical Perspectives on Accounting*, 31, 44–63. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.04.002>
- Yayuk, A., Rahayu, S., Prasajo, E., & Jannah, L. M. (2017). *Determinants of Successful Administrative Reform*.

LAMPIRAN

INSTRUMEN SURVEI

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Kepala OPD/Camat/Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Sumba Tengah
di tempat

Kami Peneliti dari Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang melakukan studi yang bertujuan untuk mengetahui persepsi para Kepala OPD, Camat serta Kepala Desa di Kabupaten Sumba Tengah mengenai penyebab utama tingginya jumlah kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah serta kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan yang paling tepat dan efektif untuk diimplementasikan di Kabupaten Sumba Tengah.

Untuk itu kami akan melakukan survei persepsi terhadap responden sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah
6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Tengah
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Tengah
8. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah
12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Tengah
13. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Tengah
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Tengah
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Tengah
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah
17. Seluruh Camat di Kabupaten Sumba Tengah
18. Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumba Tengah

Kami menjamin bahwa setiap informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i sampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Nama ataupun setiap informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam laporan studi ini tidak akan dipublikasikan dan data yang diperoleh dalam survei ini hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat kami harapkan untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam kuisisioner ini. Jika Bapak/Ibu/Saudara/i memiliki pertanyaan terkait studi ini, silakan menghubungi petugas/peneliti yang mewawancarai/melakukan survei atau dapat pula menghubungi narahubung sebagai berikut:

Nama koordinator peneliti	: Renny Savitri, S.IP., M.A
Alamat kantor	: Pusat Riset Kebijakan Publik, OR TKPEKM, BRIN Jl. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan
No Telepon	: 081321675761

E-mail

: renn004@brin.go.id

BAGIAN A . PROFIL RESPONDEN

Mohon dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner di bawah ini sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu masing-masing, dengan lengkap dan jelas.

1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor HP	
4	Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
5	Jabatan	☐ Kepala Desa ☐ Camat ☐ Kepala OPD
6	Asal OPD	☐ Sekretariat Daerah ☐ Bapelitbangda ☐ Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ☐ Dinas Kesehatan ☐ Dinas Pertanian dan ketahanan pangan ☐ Dinas Peternakan ☐ Dinas Perikanan ☐ Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan ☐ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ☐ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ☐ Dinas PUPR ☐ Dinas Sosial PPPA ☐ Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PM dan PTSP ☐ Dinas Perhubungan ☐ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ☐ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Lama Menjabat sebagai Kepala OPD	☐ 1 – 6 Th ☐ 7– 12 Th ☐ 13– 18 Th ☐ ≥ 19 Th
8	Usia	☐ 25 – 30 Th ☐ 51 – 60 Th ☐ 31 – 40 Th ☐ ≥ 61 Th ☐ 41 – 50 Th
9	Pendidikan terakhir yang ditamatkan	☐ Tamat SMA/ sederajat ☐ Tamat Diploma (D1, D2, D3) ☐ Tamat Sarjana (D4, S1) ☐ Tamat Pascasarjana (S2/ S3)

BAGIAN B . PENYEBAB KEMISKINAN DI SUMBA TENGAH

Pada bagian B ini, mohon Bapak/Ibu bisa memilih salah satu alternatif jawaban untuk semua pernyataan sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu terhadap penyebab tingginya kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah dengan cara **melingkari nomor alternatif yang dipilih**. Alternatif jawaban diberikan dalam bentuk skala likert 5 poin yang memiliki arti :

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju

No.	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Mereka pemalas/tidak punya motivasi	1	2	3	4	5
2.	Mereka punya banyak anak	1	2	3	4	5
3.	Mereka adalah orang tua tunggal	1	2	3	4	5
4.	Mereka tidak punya keahlian/keterampilan	1	2	3	4	5
5.	Mereka memiliki kebiasaan minum alkohol/minuman keras	1	2	3	4	5
6.	Mereka memiliki minat yang rendah untuk bersekolah	1	2	3	4	5
7.	Mereka tidak bisa mengatur keuangan dengan baik	1	2	3	4	5
8.	Mereka membutuhkan biaya yang besar untuk membiayai kegiatan pesta adat/upacara kematian/upacara adat lainnya	1	2	3	4	5
9.	Mereka bersekolah di sekolah yang berkualitas rendah	1	2	3	4	5
10.	Mereka kekurangan lapangan pekerjaan	1	2	3	4	5
11.	Mereka memperoleh gaji/upah yang rendah	1	2	3	4	5
12.	Mereka menerima banyak bantuan pemerintah yang membuat mereka jadi malas bekerja	1	2	3	4	5
13.	Mereka tidak mendapatkan bantuan pemerintah, karena bantuan pemerintah salah sasaran	1	2	3	4	5
14.	Kabupaten Sumba tengah tidak memiliki potensi yang bisa dikelola untuk menarik investasi	1	2	3	4	5
15.	Sulitnya proses birokrasi perizinan di Kabupaten Sumba Tengah sehingga menghambat investasi untuk masuk	1	2	3	4	5
16.	Mereka tinggal di wilayah yang terisolir	1	2	3	4	5
17.	Mereka sulit mengakses transportasi antar wilayah	1	2	3	4	5
18.	Mereka mengalami kemarau panjang	1	2	3	4	5
19.	Mereka mengelola lahan pertanian yang tidak subur	1	2	3	4	5

20.	Mereka mengalami bencana alam	1	2	3	4	5
21.	Dari 20 penyebab kemiskinan diatas, pilih 3 penyebab kemiskinan yang menurut Bapak/Ibu paling berkontribusi besar menyebabkan tingginya jumlah kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah (tolong lingkari 3 jawaban Bapak/Ibu) 1. Mereka pemalas/tidak punya motivasi 2. Mereka punya banyak anak 3. Mereka adalah orang tua tunggal 4. Mereka tidak punya keahlian/keterampilan 5. Mereka memiliki kebiasaan minum alkohol/minuman keras 6. Mereka memiliki minat yang rendah untuk bersekolah 7. Mereka tidak bisa mengatur keuangan dengan baik 8. Mereka membutuhkan biaya yang besar untuk membiayai kegiatan pesta adat/upacara kematian/upacara adat lainnya 9. Mereka bersekolah di sekolah yang berkualitas rendah 10. Mereka kekurangan lapangan pekerjaan 11. Mereka memperoleh gaji/upah yang rendah 12. Mereka menerima banyak bantuan pemerintah yang membuat mereka jadi malas bekerja 13. Mereka tidak mendapatkan bantuan pemerintah, karena bantuan pemerintah salah sasaran 14. Kabupaten Sumba tengah tidak memiliki potensi yang bisa dikelola untuk menarik investasi 15. Sulitnya proses birokrasi perizinan di daerah sehingga menghambat investasi untuk masuk 16. Mereka tinggal di wilayah yang terisolir 17. Mereka sulit mengakses transportasi antar wilayah 18. Mereka mengalami kemarau panjang 19. Mereka mengelola lahan pertanian yang tidak subur 20. Mereka mengalami bencana alam					
22.	Alasan lainnya yang menurut Bapak/Ibu paling berkontribusi besar menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kab. Sumba Tengah : 					

BAGIAN C . KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN YANG COCOK/SESUAI UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DI SUMBA TENGAH

*Pada bagian C ini, mohon Bapak/Ibu bisa memilih salah satu alternatif jawaban untuk semua pernyataan sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu terhadap kesesuaian berbagai pilihan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan kondisi alam dan kondisi masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah. Mohon Bapak/Ibu **melingkari nomor alternatif yang dipilih**. Alternatif jawaban diberikan dalam bentuk skala likert 5 poin yang memiliki arti :*

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju

No.	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai	1	2	3	4	5
2.	Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa sembako	1	2	3	4	5
3.	Pemerintah memberikan bantuan Jaminan Kesehatan	1	2	3	4	5
4.	Pemerintah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1	2	3	4	5
5.	Pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan (misalnya terkait pengolahan produk pertanian, perikanan, peternakan, kewirausahaan)	1	2	3	4	5
6.	Pemerintah menyediakan bantuan modal/benih ikan/ternak/bibit tanaman/pupuk/ peralatan dan sejenisnya	1	2	3	4	5
7.	Pemerintah mengoptimalkan implementasi kebijakan upah minimum kabupaten	1	2	3	4	5
8.	Pemerintah membangun infrastruktur jalan, jembatan dan terminal	1	2	3	4	5
9.	Pemerintah memberikan bantuan Rumah layak huni/air minum/sanitasi	1	2	3	4	5
10.	Pemerintah mendorong peran serta tokoh adat dan tokoh agama untuk mengintervensi aturan adat yang membebani Masyarakat	1	2	3	4	5
11.	Pemerintah mempromosikan potensi daerah untuk menarik investor	1	2	3	4	5
12.	Pemerintah bersama BUMN/Swasta melakukan operasi pasar barang murah	1	2	3	4	5
13.	Pemerintah bersama perbankan memberikan kredit dengan bunga rendah	1	2	3	4	5
14.	Pemerintah mengurangi bantuan sosial berupa uang tunai	1	2	3	4	5
15.	Pemerintah mengurangi bantuan sosial berupa sembako	1	2	3	4	5

16.	Pemerintah memberikan subsidi pajak untuk Pelaku UMKM	1	2	3	4	5
17.	Pemerintah memberikan subsidi BBM	1	2	3	4	5
18.	Pemerintah mendorong inisiatif pihak swasta/LSM/tokoh agama/tokoh adat untuk membantu masyarakat miskin	1	2	3	4	5
19.	Pemerintah mendorong inisiatif masyarakat miskin untuk membentuk komunitas swadaya Masyarakat di setiap desa	1	2	3	4	5
20.	Pemerintah melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan Kesehatan	1	2	3	4	5
21.	Pemerintah mendorong atau menyelenggaraan bursa kerja	1	2	3	4	5
22.	Pemerintah memfasilitasi pengiriman TKI ke luar negeri	1	2	3	4	5
23.	Pemerintah mendorong pemberdayaan koperasi	1	2	3	4	5
24.	Dari 23 kebijakan pengentasan kemiskinan diatas, pilih 3 kebijakan yang menurut Bapak/Ibu akan berpengaruh besar terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sumba Tengah (tolong lingkari 3 jawaban Bapak/Ibu) : 1. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai 2. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa sembako 3. Pemerintah memberikan bantuan Jaminan Kesehatan 4. Pemerintah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat 5. Pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan (misalnya terkait pengolahan produk pertanian, perikanan, peternakan, kewirausahaan) 6. Pemerintah menyediakan bantuan modal/benih ikan/ternak/bibit tanaman/pupuk/peralatan dan sejenisnya 7. Pemerintah mengoptimalkan implementasi kebijakan upah minimum kabupaten 8. Pemerintah membangun infrastruktur jalan, jembatan dan terminal 9. Pemerintah memberikan bantuan Rumah layak huni/air minum/sanitasi 10. Pemerintah mendorong peran serta tokoh adat dan tokoh agama untuk mengintervensi aturan adat yang membebani Masyarakat 11. Pemerintah mempromosikan potensi daerah untuk menarik investor 12. Pemerintah bersama BUMN/Swasta melakukan operasi pasar barang murah 13. Pemerintah bersama perbankan memberikan kredit dengan bunga rendah 14. Pemerintah mengurangi bantuan sosial berupa uang tunai 15. Pemerintah mengurangi bantuan sosial berupa sembako 16. Pemerintah memberikan subsidi pajak untuk Pelaku UMKM 17. Pemerintah memberikan subsidi BBM 18. Pemerintah mendorong inisiatif pihak swasta/LSM/tokoh agama/tokoh adat untuk membantu masyarakat miskin 19. Pemerintah mendorong inisiatif masyarakat miskin untuk membentuk komunitas swadaya Masyarakat di setiap desa 20. Pemerintah melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan Kesehatan 21. Pemerintah mendorong atau menyelenggaraan bursa kerja 22. Pemerintah memfasilitasi pengiriman TKI ke luar negeri 23. Pemerintah mendorong pemberdayaan koperasi					

25.	Kebijakan lainnya yang menurut Bapak/Ibu akan efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah										
26.	Menurut Bapak/Ibu dari rentang 1-10 ada di angka berapa tingkat keparahan kemiskinan di Sumba Tengah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TERIMA KASIH